

# **MEMBANGUN DESA WISATA BERBASIS KOMUNITAS**

**Dr. Nur Riswandy Marsuki, S.Sos.,M.Si.**



**Inti Litera**

# MEMBANGUN DESA WISATA BERBASIS KOMUNITAS

Penulis : **Dr. Nur Riswandy Marsuki,**  
**S.Sos.,M.Si.**

Desain Sampul : Camellia Rahma Ramdhani

Tata Letak : Cahyo Saputro

ISBN : 978-634-7638-00-7

Diterbitkan oleh : **INTI LITERA, 2026**

**Redaksi:**

Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

Telp. 085641778764

Laman : [intilitera.site](http://intilitera.site)

Surel : [penerbitintilitera@gmail.com](mailto:penerbitintilitera@gmail.com)

**Anggota IKAPI: 440/JTI/2025**

Cetakan Pertama : Februari 2026

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul *Membangun Desa Wisata Berbasis Komunitas* ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ini lahir dari kegelisahan sekaligus harapan atas dinamika pengembangan desa wisata yang kerap menempatkan masyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek utama pembangunan pariwisata.

Pengembangan desa wisata sejatinya bukan semata persoalan infrastruktur, promosi, atau peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Lebih dari itu, desa wisata merupakan ruang sosial yang dibentuk, dimaknai, dan dijalani oleh komunitasnya sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan desa wisata sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif, berdaya, dan memiliki kesadaran kolektif dalam mengelola potensi lokal yang dimiliki.

Buku ini berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih utuh mengenai pengembangan desa wisata melalui perspektif konstruksi sosial dan pemberdayaan komunitas. Pendekatan integratif yang ditawarkan menempatkan partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas, revitalisasi kelembagaan lokal, serta pelestarian budaya dan lingkungan sebagai satu kesatuan proses yang saling terkait. Dengan demikian, desa wisata tidak hanya dipahami sebagai destinasi, tetapi juga sebagai proses sosial yang terus tumbuh dan berkelanjutan.

Melalui pembahasan yang reflektif dan berbasis pada realitas empirik, buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi pariwisata, pemerintah daerah, pendamping desa, serta komunitas lokal yang terlibat dalam pengembangan desa wisata. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Penulis berharap, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan inspirasi dalam mewujudkan desa wisata yang mandiri, berdaya, dan berkelanjutan, dengan komunitas sebagai aktor utama penggerakannya.

**Penulis**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I DINAMIKA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA.....	1
BAB II MEMAHAMI PENGEMBANGAN DESA WISATA.....	12
A. Konstruksi Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata .....	12
B. Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa Wisata ..	15
C. Pemberdayaan dalam Pengembangan Desa Wisata.....	18
BAB III PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT: KONSEP, PENDEKATAN, DAN REFLEKSI.....	27
A. Pariwisata Berbasis Masyarakat ( <i>Community Based Tourism</i> ).....	27
B. Pemberdayaan Komunitas sebagai Jalan Pengembangan Desa Wisata .....	29
C. Refleksi Konseptual Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat.....	32
BAB IV GOWA DAN MASA DEPAN DESA WISATA .....	34
A. Wilayah-Wilayah Desa Wisata .....	34
B. Kondisi Penduduk Desa Wisata .....	39
C. Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	42
D. Potensi Wisata .....	44
BAB V STRATEGI PENGUATAN SUMBER DAYA DAN PROMOSI DESA WISATA .....	50
A. Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan-Pelatihan Kepariwisataan .....	63
B. Re-aktivasi dan Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) .....	73
C. Penyelenggaraan Event/Festival berkala sebagai Sarana Promosi, Strategi Penarik Wisatawan, dan Penguat Identitas Desa Wisata.....	78

BAB VI REKONSTRUKSI SOSIAL DESA WISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN .....	98
A. Identifikasi dan Pemetaan Potensi Desa Wisata .....	100
B. Penguatan Struktur Sosial dan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) .....	109
C. Peran Komunitas dalam Pengembangan Desa Wisata .....	120
D. Aktivasi Program Pemberdayaan Desa Wisata .....	130
E. Evaluasi dan Keberlanjutan.....	139
D. Prinsip-Prinsip Pengembangan Desa Wisata.....	149
BAB VII MODEL KAPASITASI SOSIAL INTEGRATIF UNTUK DESA WISATA BERKELANJUTAN .....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	155
TENTANG PENULIS.....	163

# **MEMBANGUN DESA WISATA BERBASIS KOMUNITAS**

# **BAB I**

## **DINAMIKA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil peran dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai strategi yang efektif dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan, karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengembangan dan pelaksanaan program-program pembangunan (Ataöv et al., 2022). Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat lapisan bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari jebakan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya memperkuat individu tetapi juga lembaga sosial yang ada.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan merupakan elemen kunci dalam pemberdayaan (Hamid, 2018). Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program pemberdayaan, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri, serta dapat mempengaruhi keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Namun, dalam prakteknya, masih banyak tantangan dalam mengimplementasikan pendekatan kelembagaan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk ketidakadilan sosial, kebijakan yang tidak inklusif, kurangnya pemahaman tentang peran lembaga dalam pemberdayaan, dan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat (Janice, 2015).

Pemberdayaan masyarakat tidak selalu mudah dilakukan. Ada banyak tantangan dan kompleksitas yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satu aspek yang penting dalam

pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan kelembagaan. Pendekatan ini menekankan peran lembaga-lembaga dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dan memfasilitasi proses pemberdayaan (Eger et al., 2018). Pendekatan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya membangun lembaga-lembaga yang kuat dan inklusif (Prihantoro, 2017). Lembaga-lembaga ini dapat berupa organisasi masyarakat, kelompok advokasi, lembaga pendidikan, atau institusi pemerintah yang bertindak sebagai mediator dan fasilitator antara masyarakat dan kebijakan publik. Pendekatan ini juga memperhatikan peran lembaga dalam memberikan akses ke sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang diperlukan oleh masyarakat untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri (Dwijayanto, 2018).

Indonesia sebagai negara yang begitu kaya akan sumber daya alam yang dapat dikembangkan secara optimal, termasuk didalamnya sektor pariwisata. Pariwisata merupakan suatu keseluruhan elemen-elemen terkait yang didalamnya terdiri dari wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain sebagainya yang merupakan kegiatan pariwisata (Devy, 2017). Pengembangan pariwisata di Indonesia telah menjadi fokus penting dalam upaya pemerintah daerah dan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan kekayaan budaya dan alam yang dimiliki negara ini. Pariwisata dalam konteks Indonesia merupakan salah satu sektor penyokong utama perekonomian nasional setelah pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang (<https://bps.go.id>).

Komitmen pembangunan sektor pariwisata dapat dicermati dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024. Visi Kemenparekraf/ Baparekraf ini mengandung 4 (empat) kata kunci utama, yaitu (1) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju; (2) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berdaya saing; (3) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang berkelanjutan; serta (4) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal. Dijabarkan dalam Misi Kemenparekraf/Baparekraf yaitu: (1) Peningkatan kualitas manusia

Indonesia; (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia yang beribukota Kota Makassar yang termasuk sebagai kota yang sangat berkembang dalam berbagai bidang terutama pada bidang pariwisata. Kementerian Pariwisata sejak Tahun 2006 telah menetapkan Sulawesi Selatan sebagai daerah tujuan wisata unggulan nasional di luar Bali, bersama Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara. Sebagai salah satu daerah yang menjadi obyek dan daya tarik wisata di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Gowa yang memiliki banyak potensi obyek wisata yang menarik untuk dikembangkan, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata seni budaya dan wisata lainnya. Dalam kaitan pelaksanaan pengembangan potensi obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki, tidaklah terlepas dari perlunya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, tidak terkecuali adanya peran serta masyarakat dalam rangka mengakomodir kebutuhan sesuai dalam upaya peningkatan wisata secara terintegrasi dalam sebuah perencanaan, pengorganisasian dan pengembangan yang bermuara pada perwujudan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun dari segi politik (Alfitri, 2011).

Data BPS angka kemiskinan Kab Gowa mencapai 7.54%, angka tersebut dampak pandemic Covid-19. Tahun 2022 berhasil pulih dan berhasil menurunkan angka kemiskinan 7,36%. Estimasi penduduk miskin ekstrem berdasarkan persentasi mencapai 1,32% sementara periode 2022 turun 1,15%. Bappeda kabupaten Gowa mengungkapkan saat ini data hasil verifikasi dan validasi tahap kedua yang masuk kriteria miskin ekstrem (Rp. 351.957,4/bulan, sebanyak 4,158 dari pendudukn 793.061. Tingkat pengangguran Kabupaten Gowa

mencapai 3,43% tahun 2023. Data tersebut menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun kemiskinan dan pengangguran juga cukup tinggi. Data pertumbuhan diatas mengisyaratkan bahwa pertumbuhan ini tidak merata, hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata melahirkan ketimpangan, dinikmati hanya pemilik modal.

Salah satu dari pendapatan asli daerah bersumber dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, objek-objek wisata membutuhkan perhatian khusus dari pihak pemerintah dari sisi pengembangannya, selain merupakan kekayaan alam juga sebagai potret daerah yang harus dilestarikan dan dipelihara keberadaannya. Wujud penguatan sektor ke Pariwisata yang dipandang berperan penting adalah dengan keberadaan Desa Wisata. Keberadaan desa wisata kemudian sinergis dengan konsep pariwisata *community base tourism (CBT)* (pariwisata berbasis masyarakat) dan *sustainable tourism* (pariwisata berkelanjutan). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mencanangkan pengembangan desa wisata merujuk pada konsep *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan. Desa Wisata merupakan bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Ahsani et al., 2018). Desa wisata diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam, menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Pelaksanaan desa Wisata ini berdasarkan asas partisipatif, dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi pada budaya/kearifan lokal (Susanti, 2015).

Pengembangan sektor ekonomi riil sangat dibutuhkan seperti UMKM, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan dan pariwisata. Sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu peningkatan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa maka pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada peningkatan wisata disetiap desanya,

terkhusus yang mempunyai potensi obyek wisata dengan perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Gowa, sehingga dapat menekan arus urbanisasi ke kota-kota untuk mencari pekerjaan.

Penetapan desa wisata berbasis masyarakat di Kabupaten Gowa tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2010-2025 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARKAB) Tahun 2021-2035 sebagai dasar pembangunan Kabupaten Gowa tentang arah kebijakan pengembangan wisata antara lain: 1. Peningkatan pendapatan anggota masyarakat melalui kepariwisataan, 2. Pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah, 3. Peningkatan kemampuan anggota masyarakat untuk dapat memperoleh manfaat yang besar bagi kegiatan pariwisata, 4. Terwujudnya masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona, sehingga tercipta suasana yang mendukung dan menunjang semakin berkembangnya usaha dan kegiatan pariwisata.

Kabupaten Gowa, sebagai salah satu daerah dengan potensi pariwisata yang kaya akan budaya dan alam, tidak luput dari perhatian ini. Sebagai penyangga Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan diberbagai sektor riil, terutama dalam bidang pariwisata maka Kabupaten Gowa diharapkan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Kategori destinasi wisata yang berada di Kabupaten Gowa dapat dilihat dari kategori obyek wisata sejarah, wisata alam dan wisata buatan. Sehingga dalam rangka pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemic Covid-19, Pemerintah mencanangkan Program pengembangan desa wisata pada tahun 2021. Karena kabupaten Gowa kaya akan potensi wisata yang tersebar diberbagai desa, hal ini juga mengurai konsentrasi kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara tidak terpusat di Kota Bunga Malino Kecamatan Tinggimoncong. Melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Gowa telah mencanangkan 25 desa wisata sampai dari target 60 Desa Wisata pada tahun 2024.

Berdasarkan potensi alam dan desa yang dimiliki maka seharusnya Kabupaten Gowa sudah tumbuh menjadi daerah pariwisata unggulan, sehingga berimplikasi positif kepada masyarakat yang berada pada objek wisata tersebut dengan asumsi bahwa

pariwisata yang berfungsi dengan baik melibatkan seluruh elemen masyarakat (inklusif) mampu meningkatkan lapangan kerja dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Sektor pariwisata dan kualitas Sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan pada masyarakat Bali (Krismiyanti,2020).

Beberapa desa wisata di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan signifikan dan membawa dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup sosial-ekonomi warganya. Tidak hanya berhasil secara lokal, sejumlah desa bahkan telah mendapatkan pengakuan internasional berkat pendekatan Community Based Tourism (CBT) yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah Desa Wisata Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini meraih penghargaan Best Tourism Village dari United Nations Tourism pada tahun 2021, mengungguli 44 desa dari 32 negara. Pengakuan ini diberikan atas dasar sistem pengelolaan pariwisata yang terstruktur dan berbasis komunitas, yang telah dikembangkan sejak tahun 2007. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan wisata, konservasi geowisata, pertanian, dan pendidikan lingkungan menjadi fondasi utama keberhasilannya (Rohaini, Dewi, 2020).

Sementara itu, Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, juga merupakan contoh sukses pengembangan desa wisata berbasis komunitas. Sejak 1 Mei 2012, desa ini dikelola sepenuhnya oleh masyarakat melalui Lembaga Pengelola Desa Wisata, yang bertanggung jawab atas seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring kegiatan wisata. Desa Penglipuran dikenal luas sebagai salah satu desa terbersih di dunia menurut *Green Destinations*, dan keunikan serta daya tariknya tidak lepas dari keberhasilan warga menjaga kearifan lokal. Kunci keberhasilan Desa Penglipuran terletak pada konsensus kolektif warga dalam menjaga tata ruang, kebersihan, dan pelestarian budaya. Seluruh elemen masyarakat terlibat aktif dalam melestarikan adat dan budaya melalui penerapan sistem *awig-awig* (hukum adat) yang mengatur kehidupan sosial sekaligus pelestarian lingkungan (Agoes, Adrian dkk. 2023).

## BAB II

# MEMAHAMI PENGEMBANGAN DESA WISATA

### A. Konstruksi Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata

Teori Konstruksi Sosial menyatakan bahwa realitas sosial terbentuk oleh konsensus makna yang dihasilkan melalui interaksi individu dalam kelompok – bukan fakta alamiah yang ada di luar kesadaran manusia. Menurut Berger & Luckmann, tindakan yang diulang secara terus-menerus menjadi habitualisasi, yakni pola tindakan yang melekat dan dianggap “wajar” dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, pola-pola ini mengalami institusionalisasi, di mana kebiasaan tersebut diakui dan diatur oleh norma, peraturan, atau lembaga formal. Proses legitimasi kemudian membentuk dasar filosofis dan ideologis yang menjelaskan dan membenarkan keberadaan institusi serta nilai-nilai sosialnya. Akhirnya, reifikasi terjadi ketika konstruksi sosial tersebut dipersepsikan sebagai fakta alami yang tak terbantahkan. Teori Konstruksi Sosial menegaskan bahwa realitas sosial bukanlah entitas objektif yang berdiri sendiri, melainkan dibentuk (*constructed*) oleh manusia melalui proses interaksi sosial yang berulang dan terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karya mereka *The Social Construction of Reality* (1966), di mana mereka memperkenalkan kerangka habitualisasi, institusionalisasi, legitimasi, dan reifikasi sebagai tahapan proses konstruksi makna bersama.

Teori konstruksi realitas sosialnya menegaskan bahwa hubungan antara individu dan masyarakatnya bersifat dialetika, yakni individu manusia adalah produk ciptaan dari masyarakatnya dan masyarakat adalah produk ciptaan dari individu-individu sehingga keduanya saling mengkonstruksi paradigma, falsafah, nilai-nilai ideologi, norma-norma social budaya yang mempengaruhi persepsi, motivasi, sikap, tindakan, dan perilaku sosialnya. Proses dialektika itu tiga tahap yakni

eksternalisasi, objektivasi, internalisasi. Suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan obyektivasi.

Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri ditengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya. Istilah konstruksi sosial atas realitas (*sosial construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. (Poloma, 2004).

Pembahasan bagaimana pemberdayaan komunitas dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi sosial, diskursus, dan konsensus di antara aktor-aktor lokal. Konstruksi sosial merupakan sebuah sudut pandang dimana semua nilai, ideologi dan institusi adalah buatan manusia dan terbentuk secara terus menerus (Nadir, 2013). Konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan dan juga sebagai sudut pandang bahwa terdapat kandungan dari kesadaran dimana cara berhubungan dengan manusia lainya dan itu dihasilkan dari mempelajari kebudayaan dan masyarakat. Semua itu terdapat didalam sebuah cara memandang dimana sebuah skala real dan abstract yang dianggap sebuah kepastian tersebut diambil oleh sesama manusia disekitar kita. Konstruksi Sosial memiliki banyak arti yang luas dalam sebuah keilmuan sosial, yang dimana hal tersebut dihubungkan pada pengaruh sosial didalam pengalaman kehidupan individu (Puspitasari, 2018).

Konstruksi sosial menekankan bahwa realitas sosial tidaklah inheren atau objektif, melainkan dibangun secara bersama oleh individu dan masyarakat melalui interaksi, persepsi, dan interpretasi mereka terhadap dunia di sekitar. Dalam konteks pengembangan desa wisata, teori konstruksi

sosial memiliki relevansi yang signifikan karena membantu menganalisis bagaimana persepsi, nilai, norma, dan makna yang dibentuk oleh masyarakat dapat mempengaruhi proses pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Proses konstruksi sosial terjadi dalam interaksi antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata melibatkan pembentukan makna, interpretasi, dan dinamika hubungan yang mempengaruhi bagaimana destinasi wisata tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dikelola. Berikut adalah tahapan-tahapan umum dari proses konstruksi sosial dalam interaksi antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata (Soetomo, 2018) :

a. Pengenalan Kehendak dan Kebutuhan

Organisasi masyarakat dan pemerintah daerah mungkin memiliki kehendak dan kebutuhan yang berbeda dalam pengembangan desa wisata. Organisasi masyarakat mungkin berfokus pada pelestarian budaya dan lingkungan, sementara pemerintah daerah mungkin melihatnya sebagai peluang ekonomi. Tahap ini melibatkan pengenalan terhadap sudut pandang dan tujuan masing-masing pihak.

b. Kolaborasi dan Konsultasi

Tahap ini melibatkan kolaborasi dan konsultasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah. Diskusi tentang tujuan, visi, dan rencana pengembangan desa wisata dilakukan untuk mencapai pemahaman bersama dan mengidentifikasi area yang dapat saling mendukung.

c. Negosiasi dan Pembentukan Makna

Proses konstruksi sosial melibatkan negosiasi terkait tujuan, prioritas, dan implementasi. Organisasi masyarakat dan pemerintah daerah berinteraksi untuk merumuskan makna dan interpretasi bersama tentang apa yang diinginkan dari pengembangan desa wisata.

d. Pengembangan Identitas Desa Wisata

Proses konstruksi sosial juga melibatkan pembentukan identitas desa wisata. Organisasi masyarakat dan pemerintah daerah bersama-sama mengembangkan cerita, narasi, dan citra yang diinginkan untuk destinasi wisata tersebut.

e. Evaluasi dan Refleksi Bersama

Setelah tahap implementasi, proses konstruksi sosial berlanjut melalui evaluasi dan refleksi bersama. Organisasi masyarakat dan pemerintah daerah mengevaluasi dampak pengembangan, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta merencanakan langkah-langkah untuk masa depan.

## **B. Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa Wisata**

Partisipasi masyarakat merupakan konsep sentral dalam pembangunan yang menekankan keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam perspektif sosiologi pembangunan, partisipasi tidak hanya dipandang sebagai sarana demokratisasi pembangunan, tetapi juga sebagai bentuk redistribusi kekuasaan dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan. Beberapa teori utama yang relevan dalam memahami bentuk, derajat, dan kualitas partisipasi masyarakat antara lain berasal dari pemikiran Sherry Arnstein, Cohen & Uphoff, serta Jules Pretty.

Teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan menguraikan bentuk, derajat, dan kualitas keterlibatan warga dalam setiap tahap proses pembangunan, mulai dari manipulatif hingga kontrol penuh oleh komunitas. Sherry Arnstein (1969) menawarkan Ladder of Citizen Participation untuk mengkategorikan delapan level partisipasi dari *non-participation* hingga *citizen power*. Cohen & Uphoff (1980) menegaskan empat dimensi partisipasi decision-making, implementation, sharing benefits, dan evaluation sebagai kerangka analisis keterlibatan dalam pembangunan pedesaan. Sementara itu, Pretty (1995) memperkaya pemahaman dengan tipologi tujuh bentuk

partisipasi, dari manipulatif hingga self-mobilization, yang menekankan keterlibatan yang semakin otonom dan kolaboratif. Ketiga pendekatan ini dapat digunakan secara komplementer untuk menganalisis dan meningkatkan tingkat partisipasi komunitas dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Gowa.

Sherry Arnstein memperkenalkan konsep Ladder of Citizen Participation yang menggambarkan delapan tingkat partisipasi warga dalam proses pembangunan, disusun dalam tiga kategori utama (Soetomo, 2007) :

1. Non-Participation: Manipulasi, Terapi
2. Degrees of Tokenism: Informasi, Konsultasi, Placation
3. Degrees of Citizen Power: Kemitraan, Kekuasaan Deleгатif, Kontrol Warga, Pada level non-participation, warga diperlakukan sebagai objek “rehabilitasi” atau alat legitimasi tanpa kekuasaan nyata; sedangkan pada level tertinggi, warga memegang kendali penuh atas kebijakan dan implementasi program.

Teori ini menunjukkan bahwa partisipasi bukanlah sesuatu yang hitam-putih, melainkan memiliki spektrum. Pada tingkat paling rendah, partisipasi hanya bersifat simbolik atau manipulatif, sementara pada tingkat tertinggi, warga memiliki kendali penuh terhadap proses pembangunan. Dalam konteks pengembangan desa wisata, teori ini penting untuk menilai sejauh mana masyarakat desa benar-benar memiliki kuasa dalam mengarahkan pembangunan pariwisata di wilayahnya.

John Cohen dan Norman Uphoff mengembangkan kerangka partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan melalui empat dimensi utama (Humprey, 2020) :

1. Pengambilan Keputusan (Decision Making), Peran warga dalam merancang dan memilih alternatif kebijakan
2. Pelaksanaan (Implementation), Keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kegiatan
3. Pembagian Manfaat (Benefit Sharing), Distribusi manfaat secara adil antar anggota komunitas

4. Evaluasi (Evaluation), Partisipasi warga dalam menilai efektivitas dan dampak program .
5. Kerangka ini menyajikan standar kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kualitas partisipasi dalam konteks pembangunan pedesaan .

Keempat dimensi ini memberikan cara yang lebih terukur untuk memahami bagaimana partisipasi terjadi dalam praktiknya. Dalam pembangunan desa wisata, dimensi ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana warga terlibat dalam menentukan arah kebijakan wisata, dalam pelaksanaan program, hingga keterlibatan mereka dalam mengevaluasi hasil yang dicapai.

Pretty menyusun tujuh bentuk partisipasi masyarakat yang diklasifikasikan berdasarkan kedalaman dan kualitas keterlibatan (Rita, 2022) :

1. Manipulative Participation
2. Passive Participation
3. Participation by Consultation
4. Participation for Material Incentives
5. Functional Participation
6. Interactive Participation
7. Self-Mobilization,

Pada tingkatan tertinggi, Self-Mobilization, komunitas mampu menginisiasi dan mendanai sendiri kegiatan pembangunan tanpa bergantung eksternal. Model ini menekankan pentingnya transisi dari partisipasi pasif dan simbolik menuju bentuk yang lebih aktif dan berdaya, seperti partisipasi interaktif dan swamobilisasi. Dalam konteks desa wisata, pendekatan Pretty membantu mengidentifikasi strategi pemberdayaan yang memungkinkan komunitas lokal memimpin pengembangan pariwisata secara mandiri dan berkelanjutan.

Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam memberikan pemahaman menyeluruh tentang dinamika

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Arnstein memberikan perspektif normatif tentang hierarki partisipasi; Cohen & Uphoff menawarkan kerangka operasional untuk mengukur dimensi partisipasi; dan Pretty menyajikan pendekatan evolusioner terhadap kualitas partisipasi. Dengan memanfaatkan teori-teori ini, buku dapat menganalisis pola partisipasi komunitas dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Gowa secara lebih tajam, serta merancang model pemberdayaan yang integratif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

### **C. Pemberdayaan dalam Pengembangan Desa Wisata**

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sebagai objek yang pasif (Rayuddin, 2018). Dalam konteks sosiologi pembangunan, pemberdayaan dipahami sebagai proses sosial yang memungkinkan individu dan kelompok dalam masyarakat memperoleh akses terhadap sumber daya, meningkatkan kapasitas diri, dan mengembangkan kontrol terhadap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Lebih jauh, pemberdayaan mencerminkan transformasi struktur sosial yang menindas menjadi lebih inklusif, partisipatif, dan adil.

Tokoh kunci dalam pemikiran tentang pemberdayaan adalah Paulo Freire. Melalui pendekatan pedagogi kritis, Freire menekankan pentingnya kesadaran kritis (*conscientization*) sebagai landasan awal dari proses pemberdayaan. Menurutnya, masyarakat yang terpinggirkan harus dibangkitkan kesadarannya agar mampu membaca realitas sosialnya secara reflektif dan bertindak secara transformatif. Pemberdayaan tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi harus tumbuh melalui proses dialogis antara fasilitator dan komunitas itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pendekatan Freirean, pemberdayaan bukan sekadar pelatihan atau bantuan teknis, melainkan proses pembebasan struktural melalui pendidikan dan kesadaran.

## BAB III

# PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT: KONSEP, PENDEKATAN, DAN REFLEKSI

### A. Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)

Pariwisata berbasis masyarakat ini merupakan sebuah konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal (Goodwin, 2009). Dimana masyarakat turut andil dalam perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian pendapat. Jenis wisata ini merupakan alternatif dari pariwisata mainstream yang sudah ada saat ini. Pengelolaan dengan konsep *Community Based Tourism* ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pariwisata berkelanjutan karena skalanya yang kecil namun mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat lokal. Pariwisata berbasis masyarakat sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat (Damanik dan Weber, 2006). Damanik dan Weber mencoba melihat pariwisata berbasis masyarakat bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu melainkan aspek pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan, sementara aspek ekonomi menjadi “*induced impact*” dari aspek sosial, budaya dan lingkungan.

*Community Based Tourism* adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan (Chivers et al., 2022). Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (*local way of life*). Dengan demikian, *Community Based Tourism* sangat berbeda dengan pariwisata massa (*mass tourism*). *Community Based Tourism* merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan,

inisiatif dan peluang masyarakat lokal. *Community Based Tourism* bukanlah bisnis wisata yang bertujuan untuk memaksimalkan profit bagi para investor. *Community Based Tourism* lebih terkait dengan dampak pariwisata bagi masyarakat dan sumber daya lingkungan (*environmental resources*). *Community Based Tourism* lahir dari strategi pengembangan masyarakat dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat lokal.

Sunaryo (2013), menyebutkan bahwa pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas. Batasan pengertian pariwisata berbasis masyarakat atau *Community Based Tourism* sebagai berikut (Prihantoro, 2017):

1. Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
2. Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
3. Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada didestinasinya.

Pariwisata berbasis masyarakat selama ini menggunakan pendekatan dimana masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah dan swasta hanya sebatas memfasilitasi dan memotivasi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan pariwisata untuk dapat lebih memahami

tentang fenomena alam dan budayanya, sekaligus menentukan kualitas produk wisata yang ada dikawasan pariwisata yang dikelolanya. Berkaitan dengan hal tersebut, keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata akan membawa tuntutan bagi keterlibatan masyarakat. Hal ini tentunya perlu ditumbuhkan pemahaman atau persepsi yang sama dari stakeholders terkait dan memberikan ruang yang seluas luasnya bagi masyarakat sebagai pelaku utama pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat atau *Community Based Tourism*, yaitu (Sunaryo, 2013):

1. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
3. Pendidikan Kepariwisataan bagi masyarakat lokal.

## **B. Pemberdayaan Komunitas sebagai Jalan Pengembangan Desa Wisata**

Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Pemberdayaan komunitas dan pendekatan integratif merupakan konsep yang sangat relevan dalam pengembangan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sedang berkembang atau dalam konteks pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal. Pendekatan integratif dalam pemberdayaan komunitas untuk pengembangan desa wisata menekankan kolaborasi antara berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan sehingga potensi desa wisata dapat berkembang secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara implementasi pendekatan integratif (Beane, James 2014) :

## **BAB IV**

### **GOWA DAN MASA DEPAN**

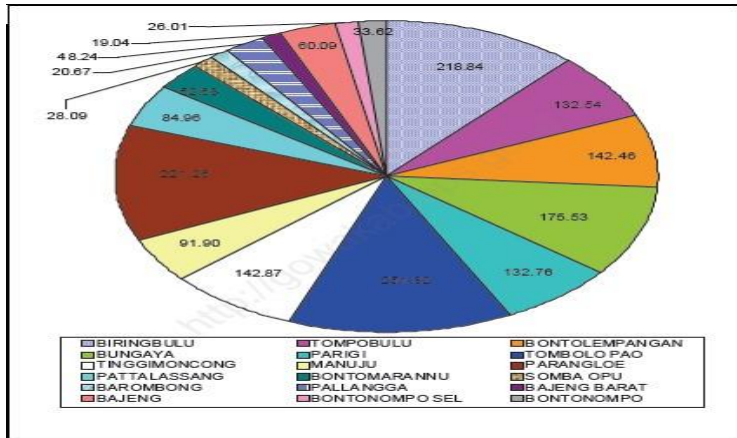
#### **DESA WISATA**

##### **A. Wilayah-Wilayah Desa Wisata**

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto sedangkan di bagian Baratnya dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas daerah sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu.

Gambar 4.1  
Luas Daerah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten  
Gowa



Sumber : Gowa dalam Angka 2024

Kabupaten Gowa memiliki karakteristik geografis yang unik dan menonjol, yang menjadi salah satu modal dasar dalam pengembangan potensi pariwisata, khususnya berbasis alam dan petualangan. Dari total luas wilayah Kabupaten Gowa, sekitar 35,30 persen di antaranya memiliki kemiringan tanah di atas 40 derajat, tersebar di wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, dan Tompobulu. Kondisi ini membentuk bentang alam yang berbukit hingga bergunung, dengan lanskap yang indah dan menawarkan pemandangan alam yang sangat potensial untuk kegiatan wisata alam seperti trekking, hiking, paragliding, dan ekowisata.

Selain topografi yang mendukung, Kabupaten Gowa juga dilalui oleh 15 sungai besar, yang memperkaya sumber daya air dan memperkuat karakteristik geografisnya. Di antara sungai-sungai tersebut, Sungai Jeneberang menjadi yang paling dominan, dengan luas daerah aliran mencapai 881 km<sup>2</sup> dan panjang 90 km. Sungai ini bukan hanya berfungsi sebagai sumber irigasi dan air baku, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata

berbasis air, seperti wisata arung jeram, wisata edukasi konservasi air, serta pengembangan kawasan agrowisata dan ekowisata berbasis sungai.

Topografi yang berbukit dan keberadaan jaringan sungai besar menciptakan lanskap alam yang menarik serta memungkinkan pengembangan berbagai produk wisata berbasis petualangan, konservasi, budaya, dan ekologi. Beberapa kawasan di Gowa, seperti wilayah dataran tinggi di sekitar Malino, telah dikenal luas sebagai destinasi wisata berbasis alam yang memanfaatkan keindahan bentang pegunungan, kesejukan udara, serta keberadaan sungai dan air terjun yang eksotis. Kondisi geografis ini, apabila dikelola secara berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan komunitas, memiliki potensi untuk memperkuat posisi Kabupaten Gowa sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan di Sulawesi Selatan, dengan mengedepankan nilai-nilai konservasi, partisipasi masyarakat lokal, serta diversifikasi produk wisata berbasis sumber daya alam.

Gambar 4.2  
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Gowa



Sumber: Gowa dalam Angka 2024

Dari luas wilayah Kabupaten Gowa, memiliki 18 kecamatan dan 167 Kelurahan /Desa yang tersebar pada dataran tinggi serta dataran rendah sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Jarak (km)</b>	<b>Jumlah Desa</b>
1	Bontonompo	Tamallayang	16,00	14
2	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30,00	9
3	Bajeng	Kalebajeng	12,00	14
4	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	7
5	Pallangga	Mangalli	2,45	16
6	Barombong	Kanjilo	6,50	7
7	Sombaopu	Sungguminasa	0,00	14
8	Bontomarannu	Borongloe	9,00	9
9	Pattalassang	Pattalassang	13,00	8
10	Parangloe	Lanna	27,00	7
11	Manuju	Moncongloe	20,00	7
12	Tinggimoncong	Malino	59,00	7
13	Tombolo Pao	Tamaona	90,00	9
14	Parigi	Majannang	70,00	5
15	Bungaya	Sapaya	46,00	7
16	Bontolempangan	Bontoloe	63,00	8
17	Tompobulu	Malakaji	125,00	8
18	Biringbulu	Lauwa	140,00	11
	<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>	<b>167</b>

Sumber: Gowa dalam Angka 2024

Upaya mempercepat pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, Kabupaten Gowa menerapkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk mengklasifikasikan status kemajuan dan kemandirian desa. IDM merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang mengukur tiga

dimensi utama, yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan. Berdasarkan hasil pengukuran IDM, desa-desa di Kabupaten Gowa diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal. Klasifikasi ini memberikan gambaran objektif tentang tingkat kemajuan desa, yang pada gilirannya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih terfokus dan efektif.

Melalui klasifikasi ini, pemerintah daerah dapat menetapkan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, perbaikan infrastruktur dasar, serta program pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah.

Tabel 4.4  
Desa Menurut Statusnya

No	Kecamatan	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal
1	Bontonompo	4	6	1	-
2	Bontonompo Selatan	-	7	1	-
3	Bajeng	10	-	-	-
4	Bajeng Barat	-	5	2	-
5	Pallangga	5	5	2	-
6	Barombong	5	-	-	-
7	Sombaopu	-	-	-	-
8	Bontomarannu	4	2	-	-
9	Pattalassang	4	4	-	-
10	Parangloe	-	4	1	-
11	Manuju	3	3	1	-
12	Tinggimoncong	-	1		-
1	Tombolo Pao	1	6	1	-

3					
1 4	Parigi	2	3	-	-
1 5	Bungaya	5	-	-	-
1 6	Bontolempangan	5	3	-	-
1 7	Tompobulu	5	1	-	-
1 8	Biringbulu	1	7	1	-
	<b>Jumlah</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>-</b>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2023

## B. Kondisi Penduduk Desa Wisata

BPS mencatat penduduk Kabupaten Gowa berjumlah 799.999 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Penduduk Gowa mengalami pertumbuhan sebesar 1,53 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Gowa mencapai 425 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Somba Opu dengan kepadatan sebesar 5.557 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Parangloe dan sebesar 88 jiwa/km<sup>2</sup>. Di bawah ini dapat dilihat sebaran penduduk Kabupaten Gowa menurut kecamatan dan jenis kelamin.

Tabel 4.5  
Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bontonompo	19.924	21.68	41.604
2	Bontonompo Selatan	14.429	15.716	30.145
3	Bajeng	32.574	33.423	65.997
4	Bajeng Barat	11.834	12.431	24.265
5	Pallangga	51.53	52.993	104.523
6	Barombong	18.031	18.524	36.555
7	Sombaopu	68.398	69.544	137.942
8	Bontomarannu	16.401	16.685	33.086
9	Pattalassang	11.515	11.651	23.166
10	Parangloe	8.571	8.967	17.538
11	Manuju	7.248	7.673	14.921
12	Tinggimoncong	11.637	11.801	23.438
13	Tombolo Pao	14.445	14.009	28.454
14	Parigi	6.585	7.274	13.859
15	Bungaya	8.142	8.636	16.778
16	Bontolempangan	6.768	7.348	14.116
17	Tompobulu	14.817	15.857	30.674
18	Biringbulu	16.726	17.522	34.248
	<b>Jumlah</b>	<b>396.130</b>	<b>403.869</b>	<b>799.999</b>

Sumber: Dinas kependudukan dan Capil Gowa, 2023

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Gowa yaitu sekitar 97%. Artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Sebaran penduduk Kabupaten Gowa menurut kecamatan menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Sombaopu sebanyak 137.942 jiwa, disusul Kecamatan Pallangga sebanyak 104.523 jiwa dan Kecamatan Bajeng sebanyak 65.997 jiwa. Kecamatan Parigi sebagai wilayah dengan penduduk terendah,

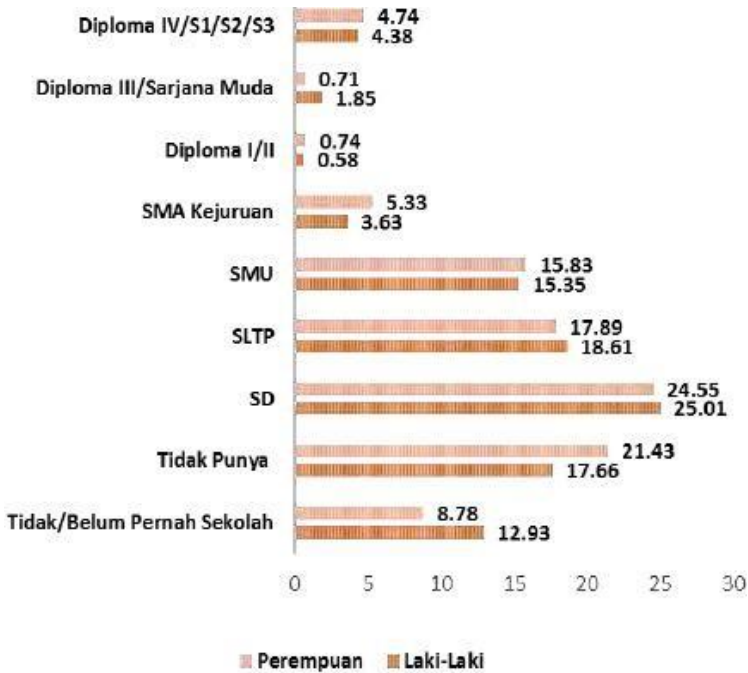
dengan jumlah penduduk hanya sebanyak 13.859 jiwa, kemudian disusul Kecamatan Bontolempangan dengan posisi kedua terendah dengan jumlah penduduk sejumlah 14.116 jiwa.

Berdasarkan data kependudukan terbaru, dari total jumlah 799.999 jiwa penduduk Kabupaten Gowa, tingkat pendidikan yang ditamatkan masih didominasi oleh jenjang pendidikan dasar. Sebanyak 25,01% penduduk laki-laki dan 24,55% penduduk perempuan tercatat hanya menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat sekolah dasar (SD).

Sementara itu, persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan di tingkat perguruan tinggi masih tergolong sangat rendah. Untuk jenjang Diploma I/II, Diploma III, hingga Diploma IV/S1/S2/S3, jumlahnya hanya berkisar antara 0,58% hingga 4,78% dari total penduduk. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses dan capaian pendidikan di Kabupaten Gowa, yang menjadi tantangan tersendiri dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa wisata berbasis komunitas.

Kondisi ini berimplikasi terhadap strategi pemberdayaan yang perlu dirancang dalam pengembangan desa wisata, khususnya dalam aspek peningkatan kapasitas, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan komunitas berbasis potensi lokal. Pendidikan yang relatif rendah menuntut adanya pendekatan program yang lebih aplikatif, partisipatif, serta berbasis pembelajaran langsung (*learning by doing*) untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi pariwisata desa mereka secara berkelanjutan. Dalam merancang strategi pengembangan desa wisata di Kabupaten Gowa, aspek pendidikan masyarakat perlu menjadi perhatian penting, untuk memastikan bahwa partisipasi komunitas dalam pembangunan desa tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian desa.

Gambar 4.3  
 Persentase Jenis Kelamin dan Pendidikan yang Ditamatkan



Sumber : Gowa dalam Angka 2024.

### C. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian realisasi pendapatan dari berbagai sumber penerimaan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun pendapatan lainnya yang sah. Pencapaian memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan daerah selama periode laporan, termasuk dalam hal kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya dan potensi daerahnya.

## **BAB V**

# **STRATEGI PENGUATAN SUMBER DAYA DAN PROMOSI DESA WISATA**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan wisata. Partisipasi masyarakat merupakan langkah utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera, terbukti dari adanya kelompok masyarakat yang sadar akan lingkungan menjadikan masyarakat tersebut lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan segala sesuatu. Dalam pengembangan wisata yang perlu diperhatikan adalah tingkat kebersamaan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan serta dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal dan pelestarian budaya merupakan salah satu cara untuk mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat serta memposisikan masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pengembangan wisata Kabupaten Gowa. Pentingnya partisipasi masyarakat berdampak pada keberlangsungan usaha yang dilakukan, melalui bentuk-bentuk partisipasi dalam teori partisipasi, diantaranya adalah partisipasi berupa gagasan atau pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, dan partisipasi harta benda (Muhtar, 2021). Hal yang sangat penting dari Desa Wisata adalah kerjasama penduduk lokal dan keikutsertaan komunitas melalui jaringan yang tepat dapat menjadi suatu yang memenuhi prasyarat dari keberlanjutan sebuah Desa Wisata (Cooper et al., 2005). Kelestarian lingkungan yang menjadi syarat utama dari keberlanjutan perlu adanya aktor utama yang menggerakkan aktor tersebut adalah komunitas yang berpartisipasi dalam pengembangan wisata di desanya (Manaf et al., 2018).

Partisipasi komunitas merupakan elemen krusial dalam pengembangan desa wisata, yang tidak hanya berkontribusi pada keberhasilan misi desa wisata, tetapi juga pada pemberdayaan

masyarakat lokal. Kajian yang dilakukan di tiga desa wisata di Kabupaten Gowa yaitu Desa Wisata Bissoloro, Desa Wisata Belapunranga, dan Desa Wisata Pao menemukan bahwa pola partisipasi komunitas dikategorikan ke dalam tiga bentuk yaitu partisipasi semu/pasif, partisipasi teknis, dan partisipasi aktif.

Partisipasi semu/pasif ditandai dengan keterlibatan komunitas yang hanya bersifat formal, di mana masyarakat berperan untuk memenuhi kebutuhan administrasi tanpa adanya pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, partisipasi teknis menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses tertentu, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah desa atau pihak swasta. Terakhir, partisipasi aktif mencerminkan kondisi di mana komunitas memiliki kontrol penuh dan akses terhadap keputusan yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam merancang dan mengelola destinasi wisata.

### **1. Partisipasi semu/pasif**

Partisipasi komunitas merupakan salah satu kunci pendorong keberhasilan pengembangan desa wisata. Hal ini karena masyarakat dan komunitas lokal adalah aktor utama yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan, kekhasan, dan relevansi keberlanjutan pembangunan program wisata di desanya. Tanpa keterlibatan komunitas, pengembangan desa wisata berisiko kehilangan dukungan dan keberlanjutan jangka Panjang hingga pada ketidakpedulian. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa tingkat partisipasi semu atau pasif di lokasi kajian tergolong tinggi. Temuan ini sejalan dengan indikator kajian dan hasil observasi lapangan yang penulis lakukan, sebagai berikut :

#### **a. Proses Perencanaan**

Salah satu program wisata di Desa Bissoloro yakni Pasar Wisata terbengkalai dan kondisi memprihatinkan. Itu bisa menjadi indikator adanya masalah dalam perencanaan, pengelolaan, atau partisipasi komunitas yang tidak optimal. Masalah utama yang dihadapi pasar wisata di Desa Bissoloro, yaitu kegagalan pengelolaan dan

kurangnya dukungan berkelanjutan. Pasar yang diinisiasi pemerintah Desa ini sesungguhnya dilandasi dengan niat yang baik namun minim dalam perencanaan dan keberlanjutannya. Dari segi anggaran pun menghabiskan dana yang tidak sedikit. Keterlibatan komunitas dalam ambil bagian dan mengelola pasar terabaikan sehingga menyebabkan kondisi tersebut. Pemerintah desa diharapkan mampu bersinergi dengan semua pihak agar agenda pembangunan berjalan baik dan tidak sekadar formalitas belaka.

Hasil kajian ini tentu tidak sejalan dengan adanya pengelolaan desa wisata tanpa melibatkan berbagai *stakeholder*. Terdapat berbagai lembaga (institusi) yang berperan penting dalam membangun destinasi pariwisata. Hall (2003) menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai institusi formal dan lembaga lokal di berbagai tingkatan untuk menunjang destinasi pariwisata. Pada konteks perdesaan, pemerintahan di tingkat desa adalah institusi resmi yang mengatur jalannya pemerintahan di perdesaan. Terdapat pula organisasi non-pemerintah yang dapat berkontribusi dalam pengembangan wisata perdesaan. Organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal memiliki andil dalam memajukan wisata perdesaan (Junaid & M. Salim, 2019; Junaid, 2021). Segala potensi desa dapat bermanfaat untuk masyarakat melalui peran kelembagaan lokal di perdesaan.

b. Keterlibatan dan Keputusan

Scott (2014) mengemukakan bahwa teori institusi diawali dari adanya aktor yang berperan sebagai pelaku dan kejadian yang dibentuk oleh adanya tindakan dan keinginan dari masa lampau. Dengan kata lain, teori institusi merupakan bagian dari adanya teori konstruksi (*construction theory*) (Falaster et al., 2017). Upaya untuk membangun masyarakat tidak terlepas dari adanya suatu *system social* yang menjadi panduan masyarakat, salah

satunya dalam aktifitas kepariwisataan. Terdapat 3 (tiga) pilar yang membentuk adanya institusi (Falaster et al., 2017; W. Scott, 2005). Sistem pertama adalah sistem regulasi, diartikan sebagai seperangkat aturan atau hukum yang mengatur para *stakeholder* yang berada dalam konteks regulasi tersebut. Adapun temuan pada kajian ini pemerintah setempat selaku regulator dalam penetapan desa wisata hanya datang untuk memberi tahu (*top-down approach*), bukan mengajak masyarakat untuk berdiskusi atau bersama-sama merumuskan rencana perihal penetapan Desa Wisata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan strategis sudah ditentukan sebelumnya tanpa mempertimbangkan masukan masyarakat lokal. Sistem kedua adalah sistem normatif, diartikan sebagai suatu standar yang seharusnya menjadi acuan dalam rangka menjalankan aktifitas sesuai bidang pekerjaannya (Falaster et al., 2017; W. Scott, 2005). Dalam konteks desa wisata atau wisata perdesaan, terdapat standar yang menjadi acuan jika suatu desa akan dikelola sebagai destinasi pariwisata. Adapun dalam temuan kajian diketahui pelibatan hanya untuk memenuhi keperluan administrasi semata karena untuk mengikuti Anugerah Desa Wisata (ADWI). Kriteria tersebut meliputi daya tarik wisata, amenitas, digital, kelembagaan dan SDM serta resiliensi (wisata berkelanjutan atau memperhatikan isu lingkungan). Terkhusus kriteria ini menilai kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan di desa wisata, seperti ketersediaan SDM yang terampil, struktur organisasi yang jelas, dan program pengembangan SDM. Salah satu indikatornya ada kelompok sadar wisata (Pokdarwis) atau komunitas lainnya yang fokus pada kepariwisataan dan isu lingkungan.

Pada sistem ketiga, pendekatan kultural-kognitif diartikan sebagai makna atau hasil yang memberikan makna terhadap kehidupan sosial, tindakan yang akan

diambil sesuai dengan tujuan yang akan dicapai (Falaster et al., 2017; W. Scott, 2005). Program pasar wisata ini pembangunan sejak awal tidak terjadi komunikasi yang intens dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pariwisata, misalnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna dan kelompok usaha lainnya. Sehingga kepengelolaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tidak dapat maksimal mengingat tugas dan dinamika pemerintahan di Desa. Tidak ada rencana jangka Panjang atau pendampingan dari pihak pemerintah kabupaten sehingga operasional pasar tidak terarah dan tidak mampu membawa manfaat berkelanjutan. Komunitas pemuda yang ada di desa tidak diberikan ruang dan akses yang cukup untuk memahami bagaimana itu desa wisata, rincian program, tujuan, hingga dampaknya bagi masyarakat. Pengetahuan pada esensi desa wisata berdasar pada objek wisata belaka. Proses komunikasi yang tidak efektif membuat komunitas merasa tidak dilibatkan secara utuh.

c. Pelibatan dalam Kegiatan

Akselerasi sebuah perubahan yang terjadi di masyarakat seringkali dikaitkan dengan kehadiran aktor yang mampu merepresentasikan dirinya sebagai pendorong sekaligus pengubah (*agent of change*). Wirawan (2015) secara tegas menghubungkan ketersediaan aktor dengan tingkat kecepatan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dengan menyebutnya bahwa seringkali kita bergantung pada kekuatan pengaruh yang dimiliki oleh seseorang untuk suatu tujuan yang jelas. Masyarakat yang partisipatif adalah masyarakat yang di dalamnya terdapat agen pengubah yang mendedikasikan dirinya untuk kemajuan masyarakatnya. Masyarakat harus mampu menemukan figur dan memberinya akses serta tanggung jawab untuk menciptakan sebuah kondisi yang lebih baik.

Hal di atas tidak sejalan dengan hasil kajian yang ditemukan di Kabupaten Gowa jika Musyawarah desa dilakukan, tetapi keputusan sudah ditentukan oleh pemerintah desa dan terdapat program “titipan kabupaten” seperti truck sampah, damkar mini yang notabene beberapa desa tidak membutuhkan karena kondisi geografis. Hal ini mengindikasikan terdapat potensi adanya konflik kepentingan di dalam pengelolaan suatu organisasi khususnya yang mengelola desa wisata.

d. Pengakuan peran dan lokal

Strategi pengelolaan desa wisata berkaitan erat dengan peran dan fungsi kelembagaan lokal dalam mengelola lembaga. Potensi wisata di suatu desa perlu dikelola oleh masyarakat, namun perlu ditunjang dengan peran dan fungsi kelembagaan (Holid, A. 2021). Buku ini menekankan pentingnya organisasi atau lembaga lokal sebagai strategi membangun desa wisata atau wisata perdesaan. Buku ini menekankan pentingnya eksistensi kelembagaan lokal sebagai strategi pertama dalam pengelolaan desa wisata. Kelembagaan lokal perlu memahami pengelolaan potensi dan sumber daya yang ada di perdesaan. Desa memiliki sumber daya pariwisata (*tourism resources*) berbasis alam, budaya dan buatan. Kapasitas atau kemampuan anggota Pokdarwis dalam mengelola sumber daya tersebut dapat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan desa wisata.

e. Pemberdayaan Kapasitas

Sumber daya manusia di perdesaan masih menjadi tantangan bagi pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Sumber daya manusia yang masih kurang ini berdampak terhadap pengelolaan desa wisata dan kesadaran masyarakat. Untuk menciptakan kualitas pengelola kawasan wisata desa maka diperlukan pelatihan berkelanjutan dan berbasis kebutuhan terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil kajian di Kabupaten Gowa khususnya di desa wisata Bissoloro,

dan penguatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai motor penggerak partisipasi lokal, serta penyelenggaraan event dan festival berkala sebagai sarana promosi destinasi, strategi menarik kunjungan wisatawan, sekaligus memperkuat identitas budaya desa wisata. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa pemberdayaan komunitas tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pembangunan struktur sosial dan penguatan posisi komunitas sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

#### **A. Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan-Pelatihan Kepariwisataan**

Peningkatan kapasitas merupakan langkah strategis dalam pemberdayaan komunitas di desa wisata. Dengan membekali anggota komunitas dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata desa. Pelatihan kepariwisataan menjadi salah satu upaya yang efektif untuk mengasah kemampuan masyarakat, baik dalam aspek teknis seperti pelayanan wisata maupun aspek strategis seperti pemasaran dan pengelolaan destinasi. Melalui pelatihan yang terstruktur, masyarakat tidak hanya mampu memenuhi dan menyesuaikan kebutuhan wisatawan, tetapi juga menciptakan budaya pariwisata yang ramah dan autentik, sehingga daya tarik desa wisata dapat menjadi pilihan.

Praktik peningkatan kapasitas komunitas pada desa wisata dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu yang terprogram dan yang insidental. Kedua bentuk ini memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan peran aktif masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan desa. Dari pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa meskipun berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan secara terprogram, belum ada yang secara khusus menyentuh atau diarahkan pada sektor kepariwisataan.

Prioritas utama pembangunan desa saat ini masih difokuskan pada kebutuhan mendasar masyarakat dan penguatan fungsi pemerintahan desa. Pembangunan jalan desa dan jalan tani untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat. Penyediaan akses air bersih sebagai kebutuhan dasar sehari-hari dan peningkatan fasilitas kesehatan melalui pos Kesehatan/posyandu untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Program pemberdayaan diarahkan pada sektor pertanian untuk mendukung ekonomi lokal yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Aktivitas pemberdayaan melalui PKK untuk mendukung pemberdayaan perempuan, terutama dalam kegiatan sosial dan penguatan peran keluarga.

Tabel 5.5  
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata

No	Desa wisata	Program Pemberdayaan	Anggaran	Tahun
1.	Belapunran ga	✓ Peningkatan produksi peternakan (pengelolaan kandang	Rp. 29.110.000	2003
		✓ Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Dana Desa Rp. 1.638.551.636,-	2004
		✓ Pelatihan pengelolaan BUM Desa	Rp. 49.649.000	
		✓ Peningkatan kapasitas perangkat / aparaturnya	dari dana desa Rp. 1.771.334.102,-	
		✓ Pelatihan dan penyuluhan		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pemberdayaan perempuan</li> <li>✓ Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan anak</li> <li>✓ Pelatihan pengelolaan BUM-Des</li> </ul>		
2.	Bissoloro	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bantuan Bibit perikanan</li> <li>✓ Penguatan ketahanan pangan/lumbung desa</li> <li>✓ Bintek Teknologi Tepat Guna Pertanian</li> <li>✓ Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan petani</li> <li>✓ Pelatihan Pengelolaan BUM-Desa</li> <li>✓ Pembangunan Pasar Desa</li> </ul>	<p>Rp. 128.856.000,- dari dana desa Rp. 1.918.707.643,-</p> <p>Rp. 281.158.700 dari dana Desa 1.783.934.560,-</p>	<p>2023</p> <p>2024</p>
3.	Pao	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penguatan pangan tingkat desa</li> <li>✓ Pelatihan kelompok sadar wisata (Pokdarwis)</li> </ul>	<p>Rp. 69.830.000,- dari dana desa Rp. 1.990.662.340,-</p>	<p>2003</p> <p>2024</p>

	✓ Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp. 80.090.000,- dari dana desa Rp. 2.133.097.091,-	
	✓ Pelatihan Pengelolaan BUM-Des		
	✓ Peningkatan kapasitas aparatur desa		
	✓ Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan		

Sumber : Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2023-2024

Pengembangan pariwisata belum menjadi fokus atau prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat karena perhatian desa masih terpusat pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Realitasnya desa lebih memprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak langsung dan nyata bagi masyarakat dalam jangka pendek, seperti peningkatan hasil pertanian dan pemberdayaan perempuan melalui PKK. Maka untuk menjadikan pariwisata sebagai bagian dari program pemberdayaan, diperlukan perubahan/intervensi kebijakan, pemahaman mendalam tentang potensi pariwisata, dan dukungan dari pihak eksternal.

Pengembangan desa wisata memerlukan sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Desa membutuhkan arahan, kebijakan yang jelas, serta dukungan teknis dan finansial dari kabupaten agar dapat mengembangkan potensi wisata secara optimal. Tanpa instruksi dan dukungan tersebut, desa cenderung fokus pada prioritas pembangunan lain yang dianggap lebih mendesak. Usulan program dari

Kabupaten misalnya pada pengadaan truk sampah untuk semua desa, dan itu telah terealisasi. Proyek truk sampah ini untuk mendukung program Gowa bersih. Penulis yakin kalau hanya untuk pemberdayaan yang dari segi anggaran masih tergolong kecil.

Program yang dijalankan oleh dinas tidak berfokus pada pembangunan fisik, tetapi lebih pada pelayanan dan pembinaan yang ditujukan untuk mengembangkan aspek non-fisik desa wisata. Dinas pariwisata tidak terlibat langsung dalam pembangunan sarana fisik objek wisata terlebih pada desa wisata, tetapi lebih mengutamakan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan serta pembinaan terhadap masyarakat dan lembaga terkait di desa wisata.

Tabel 5.6  
Program Dinas Pariwisata Gowa berhubungan dengan  
Pemberdayaan

No.	Program	Tahun Anggaran
1.	Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2022
2.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata	2022
3.	Monitoring dan evaluasi Daya Tarik Wisata	2022
4.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata	2023
5.	Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata	2023

*Sumber : SIPD Disparbud Gowa*

Namun keterbatasan anggaran sebagai tantangan utama dalam pelaksanaan program-program dinas pariwisata. Keterbatasan dana atau anggaran menjadi faktor utama yang membatasi ruang gerak dinas pariwisata dalam menjalankan berbagai program pembangunan kapariwisataan terkhusus pada desa wisata. Karena terbatasnya anggaran, maka program yang berkaitan peningkatan kapasitas, dinas pariwisata harus

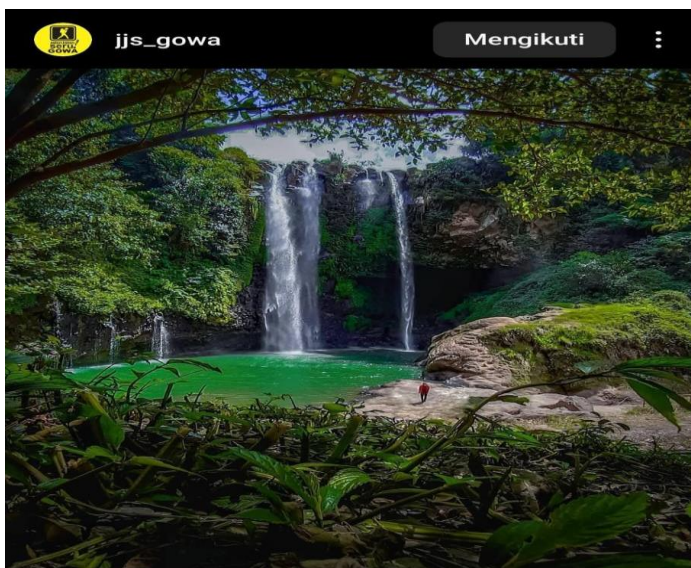
memprioritaskan program tersebut menyoar pada kelompok tertentu/perwakilan kelompok mana yang dianggap lebih penting atau lebih berdampak langsung terhadap pengembangan kepariwisataan. Meskipun demikian, prioritas terhadap program-program seperti pelatihan dan pembinaan, dapat tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk mengoptimalkan pengembangan desa wisata.

Kepariwisataan berbasis komunitas menjadi langkah penting untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Menempatkan komunitas lokal sebagai pelaku utama dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas pariwisata menjadi langkah penting untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pelestarian lingkungan dan pemberdayaan sosial. Proses pemberdayaan bagi komunitas dalam mendapatkan pemahaman terkait aspek penting dalam dunia wisata diperoleh dari pelatihan yang diberikan oleh perguruan tinggi dan program dari perusahaan yang beroperasi didesa.

Pelatihan yang difasilitasi oleh perguruan tinggi, melalui kolaborasi antara mahasiswa dan dosen, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan komunitas desa wisata. Pelatihan yang diberikan sudah mencakup beberapa aspek penting pariwisata. Sesi pelatihan ini juga mendukung persiapan desa dalam mengikuti kompetisi seperti Anugerah Desa Wisata. Informasi yang disampaikan membantu masyarakat memahami bagaimana meningkatkan daya saing desa wisata mereka. Sehingga mereka mengetahui Langkah apa yang mereka harus lakukan untuk mengembangkan desa wisata. Pelatihan memberikan wawasan baru kepada masyarakat dan komunitas desa wisata, meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata lokal sehingga komunitas lebih percaya diri dalam mempersiapkan, menyambut wisatawan dan mempromosikan desa mereka melalui media sosial. Perguruan tinggi berperan sebagai mitra strategis yang memberikan pendampingan dan

Peningkatan kapasitas komunitas pun dilakukan melalui inisiatif mandiri. Komunitas secara mandiri mengadakan pelatihan berbasis kebutuhan penting terkait pengembangan wisata.

Gambar 5.4  
Air Terjun Bantimurung Gallang di Desa Pao



Sumber : Capture Instagram JJS Gowa

Pemanfaatan media sosial sebagai alat promosi efektif untuk desa wisata. Komunitas menyadari bahwa media sosial, seperti Instagram, memiliki kekuatan besar dalam menjangkau khalayak luas dengan efisien dan biaya yang relatif rendah, modal kouta.. Hal ini menjadi strategi promosi yang strategis untuk memperkenalkan potensi desa wisata ke publik, sekaligus mengajak keindahan desa. Promosi itu melalui konten kreatif berupa video atau foto yang menampilkan keindahan desa, seperti spot-spot wisata alam, budaya, atau kegiatan unik yang menjadi ciri khas desa. Melalui peningkatan kapasitas membuat konten, komunitas sadar wisata ini telah belajar keterampilan baru seperti fotografi, pengeditan video, dan manajemen media

sosial, yang juga sebagai daya dukung utama dalam mengembangkan desa wisata. Dengan melibatkan komunitas sebagai kreator konten dan memanfaatkan teknologi seperti drone, desa wisata dapat meningkatkan daya tarik dan memperluas jangkauan promosi. Pendekatan ini tidak hanya memperkenalkan keindahan desa, tetapi juga memberdayakan komunitas khususnya anak muda, untuk menjadi bagian dari pembangunan pariwisata didesa.

Gambar 5.5

Pelatihan Membuat Souvenir dari Buah Pinus di Desa Bissoloro



Sumber : Dokumentasi penulis, 2024

Adanya upaya awal yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat, terutama pemuda, dalam mengelola potensi lokal dan mengembangkan produk souvenir dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar desa wisata. Pelatihan ini di inisiasi oleh komunitas dari luar bekerjasama dengan komunitas lokal. Pelatihan ini memberikan informasi terkait pemanfaatan potensi yang ada yakni buah pinus sebagai bahan membuat souvenir mulai dari gantungan kunci hingga hiasan dinding.

Gambar 5.7  
Gerbang Objek Wisata Moncong Sipolong Desa Bissoloro



Sumber : Dokumentasi penulis, 2024

Desa wisata Bissoloro memiliki potensi alam yang kaya, dan dalam hal ini, buah pinus yang melimpah di sekitar desa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan souvenir. Penggunaan bahan lokal seperti buah pinus merupakan strategi yang baik untuk menciptakan produk yang unik dan terkait langsung dengan identitas desa wisata. Meskipun pelatihan sudah dilakukan, produk souvenir dari buah pinus tidak berkembang lebih lanjut karena tidak ada tindak lanjut yang serius. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengelolaan yang terstruktur, pelatihan lanjutan dan minimnya modal. Agar produk souvenir tersebut dapat berkembang, diperlukan dukungan lebih lanjut, seperti pelatihan lanjutan, agar dikembangkan lagi, dalam hal kualitas sehingga nilainya bertambah. Selain itu diperlukan pembentukan kelompok usaha atau koperasi yang bisa fokus pada pengelolaan produk souvenir dari buah pinus ini. Kelompok ini memiliki peran dalam pengumpulan bahan baku, produksi, hingga pemasaran souvenir secara terorganisir. Modalnya dapat dianggarkan melalui anggaran dana desa.

## **B. Re-aktivasi dan Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)**

Re-aktivasi suatu proses mengaktifkan kembali suatu kegiatan, organisasi, atau program yang sebelumnya tidak aktif atau mengalami penurunan dalam hal partisipasi, fungsi, atau efektivitas. Dalam konteks pemberdayaan komunitas dan pengembangan desa wisata, re-aktivasi merujuk pada langkah-langkah untuk mengembalikan atau memperkuat peran dari suatu lembaga atau kelompok yang sudah ada, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), agar lebih aktif dan berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebagai katalisator desa wisata. Re-aktivasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang telah terbentuk dapat kembali berfungsi dengan baik dan mampu berkontribusi pada pengembangan serta keberlanjutan desa wisata.

Pokdarwis merupakan kelompok yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dan mempromosikan potensi wisata yang ada di desa secara berkelanjutan. Re-aktivasi dan penguatan Pokdarwis membantu memperkuat peran mereka dalam pengembangan desa wisata, sehingga mereka dapat lebih aktif dan efektif dalam mengelola destinasi wisata. Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah langkah penting dalam pemberdayaan komunitas desa wisata untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Keberadaan kelompok sadar wisata di Desa Wisata merupakan hal mutlak sebagai pendorong kemajuan desa wisata.

Pentingnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai elemen utama dalam pengembangan desa wisata. Kelompok ini merupakan swadaya dan swakarsa yang seharusnya tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata didesa. Keberadaan Pokdarwis menjadi salah satu kriteria utama dalam penilaian kesiapan desa untuk menjadi desa wisata. Hal ini menunjukkan bahwa Pokdarwis adalah representasi kelembagaan formal yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pariwisata di desa.

Dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari Bupati Gowa, Pokdarwis memiliki legitimasi formal yang mengukuhkan perannya sebagai lembaga yang diakui untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata desa. Pokdarwis diharapkan memiliki program kerja yang jelas, baik untuk pengelolaan destinasi wisata, peningkatan daya tarik desa, maupun pemberdayaan masyarakat. Program kerja ini menjadi indikator kesiapan dan arah pengembangan desa wisata secara strategis. Secara umum kerangka kerja dari Pokdarwis ini berorientasi pada aspek, Pemetaan potensi wilayah, kesenian/budaya setempat, penggerak pemandu wisata, penyediaan penginapan, kuliner lokal, serta promosi daya Tarik wisata.

pariwisata sehingga menyebabkan kurangnya efektivitas pengelolaan kelompok tersebut.

Faktor lain yang menyebabkan tidak maksimalnya Pokdarwis, seorang Kepala dusun tidak bisa fokus pada pengembangan objek wisata karena terbagi pada tanggung jawab lain yang dianggap lebih mendesak, seperti urusan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat Pokdarwis tidak dapat berjalan secara maksimal. Penunjukan kepala dusun sebagai pengelola kelompok sadar wisata tanpa mempertimbangkan kapasitas waktu dan prioritas tugasnya dapat menjadi kendala serius dalam pengelolaan desa / objek wisata. Dengan banyaknya tugas yang diemban, kepala dusun menghadapi konflik kepentingan antara memprioritaskan kebutuhan masyarakat umum dan kebutuhan khusus pengelolaan desa wisata.

Pentingnya peran pemerintah daerah dalam hal ini dinas pariwisata sebagai yang menaungi desa wisata, tidak pembinaan dan dukungan berupa sosialisasi yang berkelanjutan terhadap desa wisata. Program dan kegiatan pariwisata tidak berkelanjutan, sehingga objek wisata kehilangan daya tariknya seiring waktu. Awalnya, Air terjun Buntu Manrusu menjadi viral dan menarik banyak pengunjung, menciptakan potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata sekunder. Namun, kunjungan yang padat hanya berlangsung sementara karena tidak ada strategi lanjutan untuk mempertahankan daya tarik wisata tersebut. Tidak adanya program pengelolaan dan promosi yang terstruktur menyebabkan momentum awal tidak dimanfaatkan secara optimal, kemudian ditambah dengan persoalan bagi hasil maka objek wisata ini tinggal kenangan dan cerita.

meningkatkan daya tarik desa Bissoloro sebagai destinasi wisata camping

Pentingnya pengelolaan yang terkoordinasi antara pemerintah desa (Pak Desa) dan komunitas pemuda untuk merancang dan melaksanakan acara (*event*) tahunan/berkala yang berfokus pada pengangkatan budaya lokal dan daya Tarik wisata. Acara yang terprogram dengan baik akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap promosi desa dan mencegah stagnasi dalam perkembangan pariwisata di desa. Desa wisata ini memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Untuk itu, acara tahunan/berkala yang melibatkan berbagai pihak di desa bisa menjadi cara yang efektif untuk menarik lebih banyak wisatawan, sekaligus melestarikan dan mengenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas. Pengelolaan acara ini bisa dimulai dengan kolaborasi antara pemerintah desa dan komunitas pemuda yang ada, yang seringkali memiliki ide-ide segar serta semangat untuk memajukan desa.

Menggilir lokasi pelaksanaan acara (*event*) ke beberapa area camping yang ada di desa tersebut, bukan hanya berfokus di hutan pinus Moncong Sipolong saja lokasi pelaksanaan beberapa event sebelumnya. Tujuannya adalah agar ada daya tarik baru bagi pengunjung, dengan suasana yang lebih variatif di setiap lokasi acara. Dengan demikian, pengunjung tidak merasa bosan atau terjebak dalam pengalaman yang monoton. Karena masing-masing lokasi camping memiliki karakteristik yang unik, dan menggilir tempat pelaksanaan acara bisa memberikan pengalaman yang berbeda bagi wisatawan yang datang ke desa tersebut. Narasi ini juga mencakup harapan untuk meratakan distribusi manfaat dari penyelenggaraan event ke seluruh area desa, bukan hanya terfokus di satu tempat. Hal ini dapat membantu mengoptimalkan potensi desa secara menyeluruh dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari acara dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai titik, serta mengurangi ketergantungan pada satu lokasi saja.

Selain itu, meskipun menyelenggarakan event di berbagai lokasi dapat memperkaya pengalaman pengunjung, hal ini memerlukan biaya yang lebih tinggi (*cost*). Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang baik, serta pemanfaatan program-program desa yang bisa mencakup berbagai variasi acara. Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa beberapa program desa wisata belum berorientasi pada pengembangan kepariwisataan. Dengan program yang beragam dan memasukkan kalender event pariwisata berkala baik tahunan/berkala bisa menarik pengunjung. Pentingnya variasi dan inovasi dalam penyelenggaraan event pada desa wisata merupakan suatu strategi pengembangan yang berkelanjutan, selain sebagai upaya pemberdayaan komunitas juga sebagai sarana promosi.

Melihat perbedaan antara pengelolaan acara tahunan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten dengan di tingkat desa wisata. Tingkat atas sudah ada acara tahunan yang sukses menarik wisatawan, seperti program Beautiful Malino dan Visit Sulsel. Acara tersebut tidak hanya berhasil menarik perhatian wisatawan, tetapi juga membantu mempromosikan daerah dan meningkatkan pendapatan ekonomi lokal. Tetapi pada tingkat desa terkhusus pada desa wisata, masih kurang adanya acara tahunan yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Hal ini menjadi perhatian karena desa wisata seharusnya tidak hanya menjadi label atau nama tanpa ada aktivitas yang mendukung untuk menarik wisatawan. Jika desa juga menyelenggarakan acara tahunan, acara tersebut bisa menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, sekaligus memperkenalkan budaya dan produk lokal dari desa tersebut.

Narasi ini semakin dikuatkan mengenai kemajuan infrastruktur desa, khususnya akses jalan yang sudah cukup baik, dengan hanya sedikit lagi yang perlu diperbaiki di sekitar area Selow Camp. Aksesibilitas yang baik membuat desa semakin potensial untuk menyelenggarakan acara tahunan/berkala sebagai daya tarik lebih banyak wisatawan. Dengan atraksi potensi wisata, akses infrastruktur yang

mendukung dan adanya acara tahunan yang terencana, desa wisata dapat lebih dikenal dan berkembang secara berkelanjutan. Terlebih ada dukungan amenities dari swasta ini akan memperkuat daya tarik desa wisata. Jika desa wisata melibatkan sektor swasta untuk mendukung acara tahunan atau festival yang akan dilaksanakan, maka acara tersebut bisa lebih maksimal dalam hal pengelolaan dan fasilitas yang disediakan. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah desa, komunitas lokal, dan swasta, acara tahunan yang digelar akan lebih terkoordinasi. Ini juga akan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal dengan memperluas lapangan pekerjaan. Desa wisata pun tidak hanya sekedar nama, tetapi juga semangat pembangunan sehingga menjadi aktif menyelenggarakan acara menarik yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dan memberi dampak positif bagi perekonomian desa.

Pelaksanaan event dengan berkolaborasi dengan pihak luar, salah satunya bersama perguruan tinggi, dapat membawa banyak manfaat bagi pengembangan desa wisata, baik dari segi sumber daya, maupun inovasi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi menawarkan berbagai peluang yang dapat meningkatkan kualitas dan daya tarik acara serta memperkuat pengelolaan destinasi wisata.

Kolaborasi melaksanakan kegiatan yang dilakukan dengan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar dalam menyelenggarakan kegiatan di desa. Kegiatan tersebut dipusatkan di lokasi yang strategis, yaitu di depan air terjun bantimurung, yang menjadi salah satu objek wisata utama di desa tersebut. Program yang diselenggarakan merupakan inisiatif dari Poltekpar Makassar, dan pihak desa wisata menyediakan fasilitas tempat serta dukungan dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis) setempat. Kolaborasi ini menjadi contoh sinergi antara institusi pendidikan (Poltekpar) dan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata. Poltekpar, sebagai institusi yang memiliki jurusan pariwisata, menyumbangkan pengetahuan dan keahlian mereka dalam

mengelola acara yang relevan dengan dunia pariwisata, sedangkan pihak desa membantu dalam hal fasilitas dan pengelolaan di lapangan. Ini menunjukkan adanya hubungan yang saling menguntungkan antara akademisi dan komunitas lokal.

Event dan festival tidak hanya berfungsi sebagai strategi promosi dan penarik wisatawan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial-ekonomi dan penguatan identitas budaya komunitas lokal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan event menjadi bentuk nyata dari pemberdayaan komunitas yang berkelanjutan. Adanya festival membuat banyak warga ikut terlibat, mulai dari anak-anak muda sampai ibu-ibu. Selain menambah pemasukan dari jualan makanan atau kerajinan, event seperti ini juga mempererat hubungan sosial di desa.

Kegiatan/event yang dilaksanakan tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat sekitar, tetapi juga memberi kesempatan bagi komunitas untuk belajar dan berpartisipasi dalam meramaikan objek wisata. Kegiatan ini dapat memberi dampak positif dalam mengedukasi generasi muda mengenai pentingnya pariwisata serta bagaimana mereka dapat berperan dalam memajukan sektor ini di desa mereka. Program semacam ini, desa wisata tidak hanya menjadi tempat untuk berlibur, tetapi juga menjadi ruang untuk edukasi, pengembangan keterampilan, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata secara langsung.

Kolaborasi ini juga memperlihatkan bagaimana acara yang melibatkan pendidikan tinggi dan komunitas lokal dapat menciptakan dampak yang luas, baik dari sisi pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Event ini pula menunjukkan bagaimana kolaborasi antara Poltekpar Makassar dan pokdarwis telah menghasilkan kegiatan yang bermanfaat dalam memperkuat keberadaan objek wisata, serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam dunia pariwisata.

memperkenalkan kearifan lokal. Kegiatan ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga memperkuat identitas desa wisata dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, pemerintah, dan sektor swasta, event-event ini menjadi ajang kolaborasi yang memperkuat posisi desa sebagai destinasi wisata yang dinamis dan menarik.

Maka untuk mendukung keberlanjutan dari praktik pemberdayaan tersebut perlu adanya konsistensi dalam program pelatihan untuk memastikan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Penguatan peran Pokdarwis sebagai penggerak utama dalam pengelolaan wisata dan pelibatan masyarakat. Diversifikasi event dan promosi digital untuk menjangkau wisatawan yang lebih luas dan menyesuaikan dengan tren pariwisata modern. Dengan sinergi antara komunitas, institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta, desa wisata dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Buku ini mengidentifikasi berbagai praktik pemberdayaan komunitas yang telah dijalankan sebagai bagian dari upaya pengembangan desa wisata. Praktik pemberdayaan tersebut meliputi : peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan kepariwisataan, re-aktivasi dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), penyelenggaraan event atau festival berkala sebagai sarana promosi, serta strategi untuk menarik wisatawan sekaligus memperkuat identitas desa wisata.

### **1. Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan-Pelatihan Kepariwisataan**

Peningkatan kapasitas merupakan langkah strategis dalam pemberdayaan komunitas di desa wisata. Dengan membekali anggota komunitas dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata desa. Pelatihan kepariwisataan menjadi salah satu

upaya yang efektif untuk mengasah kemampuan masyarakat, baik dalam aspek teknis seperti pelayanan wisata maupun aspek strategis seperti pemasaran dan pengelolaan destinasi. Melalui pelatihan yang terstruktur, masyarakat tidak hanya mampu memenuhi dan menyesuaikan kebutuhan wisatawan, tetapi juga menciptakan budaya pariwisata yang ramah dan autentik, sehingga daya tarik desa wisata dapat menjadi pilihan.

Praktik peningkatan kapasitas komunitas pada desa wisata dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu yang terprogram dan yang insidental. Kedua bentuk ini memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda, tetapi sama-sama bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan peran aktif masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan desa. Dari hasil pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa meskipun berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan secara terprogram, belum ada yang secara khusus menyentuh atau diarahkan pada sektor kepariwisataan.

Prioritas utama pembangunan desa saat ini masih difokuskan pada kebutuhan mendasar masyarakat dan penguatan fungsi pemerintahan desa. Pembangunan jalan desa dan jalan tani untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat. Penyediaan akses air bersih sebagai kebutuhan dasar sehari-hari dan peningkatan fasilitas kesehatan melalui pos Kesehatan/posyandu untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Program pemberdayaan diarahkan pada sektor pertanian untuk mendukung ekonomi lokal yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Aktivitas pemberdayaan melalui PKK untuk mendukung pemberdayaan perempuan, terutama dalam kegiatan sosial dan penguatan peran keluarga.

Pengembangan pariwisata belum menjadi fokus atau prioritas dalam program pemberdayaan masyarakat karena perhatian desa masih terpusat pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Realitasnya desa lebih memprioritaskan

sadar wisata ini telah belajar keterampilan baru seperti fotografi, pengeditan video, dan manajemen media sosial, yang juga sebagai daya dukung utama dalam mengembangkan desa wisata. Dengan melibatkan komunitas sebagai kreator konten dan memanfaatkan teknologi seperti drone, desa wisata dapat meningkatkan daya tarik dan memperluas jangkauan promosi. Pendekatan ini tidak hanya memperkenalkan keindahan desa, tetapi juga memberdayakan komunitas khususnya anak muda, untuk menjadi bagian dari pembangunan pariwisata di desa.

Desa wisata Bissoloro memiliki potensi alam yang kaya, dan dalam hal ini, buah pinus yang melimpah di sekitar desa yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan souvenir. Penggunaan bahan lokal seperti buah pinus merupakan strategi yang baik untuk menciptakan produk yang unik dan terkait langsung dengan identitas desa wisata. Meskipun pelatihan sudah dilakukan, produk souvenir dari buah pinus tidak berkembang lebih lanjut karena tidak ada tindak lanjut yang serius. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengelolaan yang terstruktur, pelatihan lanjutan dan minimnya modal. Agar produk souvenir tersebut dapat berkembang, diperlukan dukungan lebih lanjut, seperti pelatihan lanjutan, agar dikembangkan lagi, dalam hal kualitas sehingga nilainya bertambah. Selain itu diperlukan pembentukan kelompok usaha atau koperasi yang bisa fokus pada pengelolaan produk souvenir dari buah pinus ini. Kelompok ini memiliki peran dalam pengumpulan bahan baku, produksi, hingga pemasaran souvenir secara terorganisir. Modalnya dapat dianggarkan melalui anggaran dana desa.

Namun, tantangan yang dihadapi masih berupa keterbatasan intensitas dan kesinambungan program pelatihan, serta minimnya pendampingan pasca-pelatihan yang berdampak pada ketidakmerataan penerapan hasil pelatihan di lapangan. Jika dikaitkan dengan teori pemberdayaan komunitas, praktik peningkatan kapasitas ini

merupakan tahapan awal dalam membangun agensi sosial (*social agency*) masyarakat lokal, di mana transfer pengetahuan dan keterampilan menjadi fondasi dalam proses transformasi komunitas desa menuju kemandirian.

## **2. Re-Aktivasi dan Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)**

Re-aktivasi suatu proses mengaktifkan kembali suatu kegiatan, organisasi, atau program yang sebelumnya tidak aktif atau mengalami penurunan dalam hal partisipasi, fungsi, atau efektivitas (Mariana, 2020). Dalam konteks pemberdayaan komunitas dan pengembangan desa wisata, re-aktivasi merujuk pada langkah-langkah untuk mengembalikan atau memperkuat peran dari suatu lembaga atau kelompok yang sudah ada, yakni Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), agar lebih aktif dan berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebagai katalisator desa wisata. Re-aktivasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang telah terbentuk dapat kembali berfungsi dengan baik dan mampu berkontribusi pada pengembangan serta keberlanjutan desa wisata.

Pokdarwis merupakan kelompok yang dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dan mempromosikan potensi wisata yang ada di desa secara berkelanjutan. Re-aktivasi dan penguatan Pokdarwis membantu memperkuat peran mereka dalam pengembangan desa wisata, sehingga mereka dapat lebih aktif dan efektif dalam mengelola destinasi wisata. Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah langkah penting dalam pemberdayaan komunitas desa wisata untuk meningkatkan kualitas dan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Keberadaan kelompok sadar wisata di Desa Wisata merupakan hal mutlak sebagai pendorong kemajuan desa wisata.

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai elemen utama dalam pengembangan desa wisata. Kelompok ini

merupakan swadaya dan swakarsa yang seharusnya tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata didesa. Keberadaan Pokdarwis menjadi salah satu kriteria utama dalam penilaian kesiapan desa untuk menjadi desa wisata. Hal ini menunjukkan bahwa Pokdarwis adalah representasi kelembagaan formal yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pariwisata di desa. Dengan adanya Surat Keputusan (SK) dari Bupati Gowa, Pokdarwis memiliki legitimasi formal yang mengukuhkan perannya sebagai lembaga yang diakui untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata desa. Pokdarwis diharapkan memiliki program kerja yang jelas, baik untuk pengelolaan destinasi wisata, peningkatan daya tarik desa, maupun pemberdayaan masyarakat. Program kerja ini menjadi indikator kesiapan dan arah pengembangan desa wisata secara strategis. Secara umum kerangka kerja dari Pokdarwis ini berorientasi pada aspek, Pemetaan potensi wilayah, kesenian/budaya setempat, penggerak pemandu wisata, penyediaan penginapan, kuliner lokal, serta promosi daya Tarik wisata.

Kewajiban pembentukan pokdarwis pada awal syarat sebagai pendaftaran Anugerah Desa Wisata maka kepada desa harus membentuk. Pada desa yang sejak awal siap, maka mudah untuk memasukkan, tetapi bagi desa wisata yang masih kategori rintisan dan masih berbenah menjadi tantangan tersendiri. Sehingga ditemukan pada salah satu desa wisata penunjukkan kepengurusan Pokdarwis berbasis penunjukan secara personal dan kuasa jabatan. Sehingga keaktifan pokdarwis tidak berjalan secara maksimal dan memengaruhi pengembangan objek wisata. Ketua Pokdarwis didasarkan pada statusnya sebagai kepala dusun setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kelompok sadar wisata sering kali melibatkan perangkat desa yang memiliki posisi pada objek wisata berada. Kepala dusun dianggap memiliki pemahaman baik mengenai kondisi sosial, budaya, dan infrastruktur lokal, serta memiliki akses

langsung untuk berkoordinasi dengan pihak desa dan masyarakat. Namun realitasnya, Pokdarwis tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan dan objek wisata menjadi tidak terurus. Salah satu factor yang menyebabkan hal tersebut karena tanpa mempertimbangkan keahlian atau minat khusus di bidang pariwisata sehingga menyebabkan kurangnya efektivitas pengelolaan kelompok tersebut.

Factor lain yang menyebabkan tidak maksimalnya Pokdarwis, seorang Kepala dusun tidak bisa fokus pada pengembangan objek wisata karena terbagi pada tanggung jawab lain yang dianggap lebih mendesak, seperti urusan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang membuat Pokdarwis tidak dapat berjalan secara maksimal. Penunjukan kepala dusun sebagai pengelola kelompok sadar wisata tanpa mempertimbangkan kapasitas waktu dan prioritas tugasnya dapat menjadi kendala serius dalam pengelolaan desa / objek wisata. Dengan banyaknya tugas yang diemban, kepala dusun menghadapi konflik kepentingan antara memprioritaskan kebutuhan masyarakat umum dan kebutuhan khusus pengelolaan desa wisata.

Pentingnya peran pemerintah daerah dalam hal ini dinas pariwisata sebagai yang menaungi desa wisata, mendorong pembinaan dan dukungan berupa sosialisasi yang berkelanjutan terhadap desa wisata. Program dan kegiatan pariwisata tidak berkelanjutan, sehingga objek wisata kehilangan daya tariknya seiring waktu. Awalnya, Air terjun Buntu Manrusu menjadi viral dan menarik banyak pengunjung, menciptakan potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata sekunder. Namun, kunjungan yang padat hanya berlangsung sementara karena tidak ada strategi lanjutan untuk mempertahankan daya tarik wisata tersebut. Tidak adanya program pengelolaan dan promosi yang terstruktur menyebabkan momentum awal tidak dimanfaatkan secara optimal, kemudian ditambah

dengan persoalan bagi hasil maka objek wisata ini tinggal kenangan dan cerita.

Sebagai langkah strategis untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pokdarwis, solusi utama yang dapat diterapkan adalah melakukan re-aktivasi atau pembentukan ulang Pokdarwis. Langkah ini perlu dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting agar keberadaan kelompok sadar wisata benar-benar efektif dan mendukung pengembangan desa wisata. Individu yang dipilih menjadi anggota Pokdarwis sebaiknya memiliki komitmen tinggi dan pemahaman tentang pengelolaan, dan potensi wisata. Mereka dapat berasal dari berbagai potensi didesa tersebut seperti pemuda lokal, pelaku usaha, dan masyarakat yang memiliki pengalaman dan keinginan dalam bidang pariwisata. Melibatkan pemuda desa yang kreatif dan paham teknologi, seperti media sosial, dapat membantu dalam promosi dan inovasi pengelolaan desa wisata. Sebelum melakukan pembentukan ulang, penting untuk mengevaluasi kinerja Pokdarwis yang sudah berlalu. Identifikasi masalah, seperti kurangnya partisipasi atau minimnya program kerja, untuk dijadikan bahan pembelajaran ke depan. Re-aktivasi atau pembentukan ulang Pokdarwis langkah penting untuk memastikan kelompok sadar wisata ini dapat berfungsi optimal dalam pengelolaan desa wisata. Dengan melibatkan individu yang berkomitmen, memahami pariwisata, dan didukung oleh pelatihan-pelatihan, rencana kerja yang terukur, serta kolaborasi berbagai pihak, sekolah, perguruan tinggi dan swasta, Pokdarwis dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan desa wisata berkembang, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat lokal.

Penguatan Pokdarwis meliputi beberapa aspek penting, antara lain: peningkatan kemampuan anggota dalam mengelola destinasi wisata, membangun kemitraan dengan pihak eksternal (seperti travel agent dan media), hingga mendorong kemandirian Pokdarwis dalam

Pelaksanaan festival selamat 2 tahun berturut-turut membuat area camp di desa Bissoloro semakin dikenal, serta mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat dari hasil berjualan, penyewaan alat camp/penginapan dan parkir. Sebagai hasil dari meningkatnya jumlah pengunjung, beberapa kelompok komunitas di desa tersebut terus berbenah dan mengembangkan fasilitas yang ada, termasuk menambah beberapa lokasi untuk berkemah (*camping area*). Peningkatan fasilitas ini memungkinkan lebih banyak wisatawan menikmati alam dengan nyaman, serta meningkatkan daya tarik desa Bissoloro sebagai destinasi wisata camping.

Kemajuan infrastruktur desa, khususnya akses jalan yang sudah cukup baik, dengan hanya sedikit lagi yang perlu diperbaiki di sekitar area Selow Camp. Aksesibilitas yang baik membuat desa semakin potensial untuk menyelenggarakan acara tahunan/berkala sebagai daya tarik lebih banyak wisatawan. Dengan atraksi potensi wisata, akses infrastruktur yang mendukung dan adanya acara tahunan yang terencana, desa wisata dapat lebih dikenal dan berkembang secara berkelanjutan. Terlebih ada dukungan amenities dari swasta ini akan memperkuat daya tarik desa wisata. Jika desa wisata melibatkan sektor swasta untuk mendukung acara tahunan atau festival yang akan dilaksanakan, maka acara tersebut bisa lebih maksimal dalam hal pengelolaan dan fasilitas yang disediakan. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah desa, komunitas lokal, dan swasta, acara tahunan yang digelar akan lebih terkoordinasi. Ini juga akan memberikan dampak positif pada ekonomi lokal dengan memperluas lapangan pekerjaan. Desa wisata pun tidak hanya sekedar nama, tetapi juga semangat pembangunan sehingga menjadi aktif menyelenggarakan acara menarik yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan dan memberi dampak positif bagi perekonomian desa.

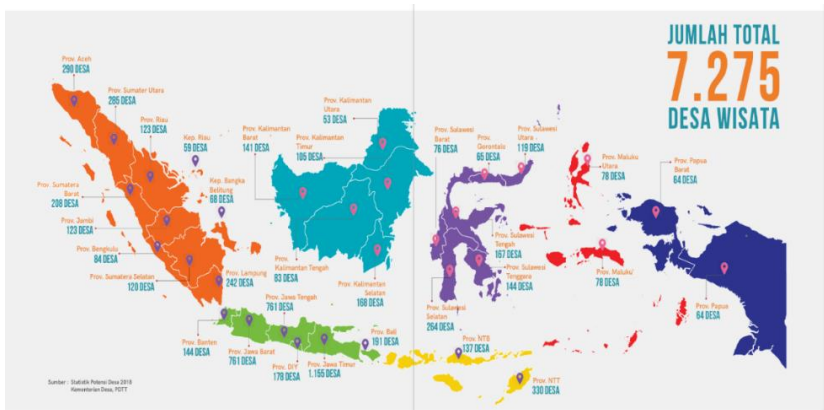
dalam pelaksanaan program pelatihan kepariwisataan. Program pelatihan tidak hanya bersifat insidental, tetapi harus terencana secara periodik dan menyesuaikan dengan kebutuhan riil komunitas agar kapasitas masyarakat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Kedua, penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai aktor sentral dalam pengelolaan desa wisata menjadi sangat krusial. Pokdarwis harus difasilitasi untuk dapat bertransformasi menjadi organisasi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika pariwisata, termasuk dalam menggerakkan partisipasi masyarakat lokal secara lebih aktif. Ketiga, perlunya diversifikasi event pariwisata yang tidak hanya mengangkat budaya lokal, tetapi juga relevan dengan selera dan minat wisatawan modern. Hal ini dapat dibarengi dengan optimalisasi promosi digital melalui media sosial dan platform daring lainnya guna memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing destinasi. Dengan ketiga strategi ini, pemberdayaan komunitas tidak hanya menjadi agenda sementara, tetapi berkembang menjadi proses jangka panjang yang berkelanjutan, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa wisata.

## BAB VI REKONSTRUKSI SOSIAL DESA WISATA BERBASIS PEMBERDAYAAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pengembangan desa wisata menjadi salah satu prioritas dalam upaya menciptakan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Desa wisata tidak hanya menjadi alternatif destinasi bagi wisatawan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelibatan aktif dalam pengelolaan potensi desa mereka. Hal ini sejalan dengan konsep pariwisata berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan nilai-nilai sosial budaya.

Gambar 5.11

Potensi Desa Wisata di Indonesia



Sumber : Kementerian Desa, 2019

Dalam pengembangannya, desa wisata dikategorikan ke dalam 4 klasifikasi, yaitu, rintisan, berkembang, maju dan mandiri. Klasifikasi rintisan ditujukan kepada desa yang memiliki potensi namun belum dilakukan upaya pengembangan. Kemudian, klasifikasi berkembang diberikan kepada desa wisata yang

potensinya telah dikembangkan dan mulai tercipta aktivitas ekonomi. Selanjutnya, klasifikasi maju diberikan untuk desa wisata yang telah memiliki sarana prasarana memadai serta keberadaanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Terakhir, klasifikasi mandiri diberikan kepada desa wisata yang telah mampu berinovasi mengembangkan pariwisatanya dan mampu memasarkan secara digital.

Berdasarkan data *Jejaring Desa Wisata (Jadesta)*, hingga 21 Oktober 2024 tercatat ada sebanyak 6.026 desa wisata yang tersebar di berbagai provinsi, dengan rincian 4.687 desa wisata rintisan, 992 desa wisata berkembang, 314 desa wisata maju dan 33 desa wisata mandiri. Dalam 10 besar provinsi dengan jumlah desa wisata terbanyak, Jawa Timur menduduki peringkat pertama. Provinsi ini memiliki 603 desa wisata yang terdiri dari 461 desa wisata rintisan, 77 desa wisata berkembang, 60 desa wisata maju dan 5 desa wisata mandiri. Sumatra Barat menduduki peringkat kedua dengan jumlah 561 desa wisata, yang mana sebagian besar merupakan desa wisata rintisan (483 desa). Untuk jumlah desa wisata berkembang, Sulawesi Selatan menjadi yang terbanyak dengan jumlah 89 desa, sedangkan untuk klasifikasi desa wisata mandiri, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah yang terbanyak yaitu 16 desa wisata, hampir setengah dari keseluruhan jumlah desa wisata mandiri di Indonesia.

Kabupaten Gowa, dengan kekayaan alam dan budayanya, memiliki potensi besar untuk mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan. Hingga tahun 2024 ini, desa wisata tersebar pada dataran tinggi dengan 10 desa wisata dan dataran rendah 15 desa wisata. Desa wisata ini masih didominasi oleh potensi alam. Klasifikasi desa wisata di Kabupaten belum ada yang masuk pada desa wisata maju dan mandiri, dari 25 desa wisata, 21 diantaranya masih dalam klasifikasi rintisan dan 4 klasifikasi berkembang. Berbagai desa di wilayah ini memiliki daya tarik unik, seperti keindahan alam pegunungan, tradisi adat yang masih terjaga, serta keragaman produk lokal yang khas. Namun, pengembangan desa wisata tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk rendahnya kapasitas masyarakat lokal, keterbatasan aksesibilitas/infrastruktur,

potensi konflik sosial jika pembangunan tidak dilakukan secara inklusif dan merata dan minimnya dukungan pihak swasta.. Pendekatan pemberdayaan komunitas integratif menjadi kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui pemberdayaan komunitas, masyarakat lokal dapat berperan aktif sebagai pelaku utama dalam pengelolaan desa wisata. Pendekatan integratif ini juga mendorong kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal, untuk menciptakan sinergi yang berkelanjutan.

#### **A. Identifikasi dan Pemetaan Potensi Desa Wisata**

Tahap awal merupakan langkah awal dalam membangun konstruksi sosial berbasis pemberdayaan komunitas. Pada tahap ini, proses identifikasi dan pemetaan potensi desa menjadi kunci untuk mengungkap sumber daya yang dimiliki desa, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun budaya. Proses ini melibatkan keterlibatan masyarakat secara aktif untuk menggali, mengenali, dan mendokumentasikan potensi yang ada. Masyarakat bersama pemangku kepentingan lainnya mengekspresikan potensi lokal melalui identifikasi dan pemetaan sumber daya desa. Potensi di desa ini meliputi potensi alam, keunikan budaya, tradisi, serta keterampilan masyarakat yang nantinya menjadi dasar perencanaan pengembangan desa wisata.

Proses eksternalisasi dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat untuk menggali ide dan potensi yang mereka miliki. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap hasil pengembangan desa wisata.

Pada desa wisata Pao itu teridentifikasi beberapa objek wisata yang sudah dirintis dan bisa dikembangkan. Objek wisata air terjun sudah di buka dan ditata sehingga sudah dapat dinikmati oleh pengunjung. Air terjun ini sudah menjadi daya tarik utama. Namun potensi aliran sungai dan pemandangan yang cantik dilokasi berbeda ada peluang untuk pengembangan wisata sungai ataupun berbasis ekowisata atau agrowisata dengan sawah terhampar luas. Desa ini memiliki warisan budaya atau sejarah yang dapat menjadi nilai tambah dalam

pengembangan wisata. Cerita masa lalu ini berpotensi untuk dikemas dalam bentuk wisata edukasi atau kegiatan budaya, sehingga memberikan pengalaman yang berbeda bagi wisatawan.

Menggambarkan bagaimana proses eksternalisasi dalam pengembangan desa wisata melibatkan inisiatif lokal, partisipasi masyarakat, dan strategi awal untuk mengidentifikasi serta memanfaatkan potensi desa. Komunitas anak muda yang bergabung pada Karang Taruna telah melakukan pemetaan lokasi yang memiliki potensi menjadi objek wisata. Objek wisata potensial pada dusun Pattalasang memiliki pemandangan indah bukti konkret bahwa komunitas mampu melihat daya tarik alami sebagai modal utama dalam pengembangan wisata. Meskipun belum ditata secara baik, lokasi tersebut mulai dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, yang secara tidak langsung memperkenalkan potensinya kepada masyarakat lokal maupun pengunjung.

Gambar 5.13

#### Promosi Rafting Travel Boat Bantimurung Gallang



Sumber : Dokumentasi penulis, 2024

Kepala desa memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan potensi wisata sebagai cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Potensi wisata di setiap dusun telah diidentifikasi dan dibuatkan peta potensi wisata dibantu oleh institusi perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan di

pemerintah atau pihak luar, tetapi juga seluruh komunitas. Kunjungan Menteri pariwisata saat itu juga menjadi momen penting untuk mempromosikan Desa Pao sebagai destinasi wisata potensial di tingkat nasional.

Selain melakukan pemetaan terhadap potensi wisata yang ada di desa, juga dilakukan identifikasi tantangan pengembangan desa wisata dan peluang yang dimiliki. Identifikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi desa, sehingga strategi pengembangan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran. Tantangan yang dihadapi mencakup berbagai aspek, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata desa.

Menunjukkan bahwa desa telah melakukan pemetaan atau pendataan terhadap potensi-potensi yang dimiliki termasuk pula tantangan yang terdapat di desa. Akses jalan yang masih berupa tanah dan sulit dilalui, terutama ketika hujan, menjadi tantangan besar dalam pengembangan desa wisata. Kondisi ini menghambat wisatawan untuk mengakses lokasi wisata, yang dapat mempengaruhi jumlah pengunjung. Infrastruktur dasar seperti listrik sangat penting untuk mendukung operasional dan kenyamanan pengunjung. Selain itu, ada juga dorongan untuk memberdayakan masyarakat melalui swadaya, di mana warga desa dapat berperan dalam memperbaiki fasilitas dan infrastruktur yang ada. Ini mencerminkan prinsip pemberdayaan komunitas dalam pengembangan desa wisata, di mana masyarakat dilibatkan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan sumber daya lokal. Wawancara ini mengungkapkan bahwa desa mengharapkan bantuan eksternal untuk perbaikan infrastruktur, baik dari pemerintah atau lembaga terkait lainnya. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi wisatawan. Desa telah mengerjakan beton ban jalan tetapi belum sampai di Kawasan camp tersebut.

Pentingnya pengelolaan yang fokus dan profesional dalam mengembangkan objek wisata. Manajemen yang baik mencakup banyak hal, seperti pelayanan wisatawan, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan fasilitas yang memadai. Fokus pada aspek ini penting untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi pengunjung. Selain manajemen, promosi menjadi faktor kunci untuk menarik wisatawan. Tanpa promosi yang baik, potensi wisata yang dimiliki desa tidak akan diketahui luas oleh masyarakat atau wisatawan, baik lokal maupun internasional. Meskipun ada potensi wisata di desa tersebut, daya tarik wisata yang ditawarkan masih terbatas. Kota Bunga Malino dan Balla Lompoa menjadi destinasi utama, namun keduanya memiliki daya tarik yang terbatas, terutama jika dibandingkan dengan desa wisata yang berada di Pulau Jawa yang sudah menawarkan paket wisata yang lebih lengkap. Misalnya Desa wisata Wukirsari, Bantul Yogyakarta sudah lebih berkembang dalam hal paket wisata yang ditawarkan, termasuk berbagai atraksi wisata, agrowisata, wisata budaya yang dikemas secara menarik.

sehingga memberikan pengalaman yang berbeda bagi wisatawan.

Proses eksternalisasi dalam pengembangan desa wisata melibatkan inisiatif lokal, partisipasi masyarakat, dan strategi awal untuk mengidentifikasi serta memanfaatkan potensi desa. Komunitas anak muda yang bergabung pada Karang Taruna telah melakukan pemetaan lokasi yang memiliki potensi menjadi objek wisata. Objek wisata potensial pada dusun Pattalassang memiliki pemandangan indah bukti konkret bahwa komunitas mampu melihat daya tarik alami sebagai modal utama dalam pengembangan wisata. Meskipun belum ditata secara baik, lokasi tersebut mulai dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, yang secara tidak langsung memperkenalkan potensinya kepada masyarakat lokal maupun pengunjung. Aktivitas sederhana ini adalah langkah awal untuk menciptakan kesan positif dan menumbuhkan minat terhadap lokasi tersebut sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut.

Potensi wisata di setiap dusun telah diidentifikasi dan dibuatkan peta potensi wisata dibantu oleh institusi perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan di desa. Kegiatan dari kampus ini merupakan pengabdian kepada masyarakat tentang cara mengelola potensi wisata secara berkelanjutan. Desa ini memiliki keragaman sumber daya yang dapat menjadi daya tarik wisata, seperti potensi alam dan agrowisata. Setiap dusun memiliki karakteristik yang unik, sehingga pengembangan wisata perlu disesuaikan dengan keunikan masing-masing.

Penunjukan Desa Pao dalam ADWI Tahun 2021 menjadi peluang besar untuk memetakan kembali potensi desa dengan lebih terarah. Ini mencerminkan pentingnya momen kompetisi untuk mendorong desa lebih serius dalam memaksimalkan asetnya. Pemetaan kembali disertai survey yang melibatkan pihak terkait. Survey ini penting untuk memberikan rekomendasi teknis dan memastikan bahwa potensi desa sesuai dengan kriteria yang diharapkan dalam kompetisi. Dengan melibatkan masyarakat, desa membangun rasa memiliki terhadap program ini, sehingga pengembangan wisata tidak

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pihak luar, tetapi juga seluruh komunitas. Kunjungan Menteri pariwisata saat itu juga menjadi momen penting untuk mempromosikan Desa Pao sebagai destinasi wisata potensial di tingkat nasional. Selain melakukan pemetaan terhadap potensi wisata yang ada di desa, juga dilakukan identifikasi tantangan pengembangan desa wisata dan peluang yang dimiliki. Identifikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi desa, sehingga strategi pengembangan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran. Tantangan yang dihadapi mencakup berbagai aspek, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wisata, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata desa.

Pentingnya pengelolaan yang fokus dan profesional dalam mengembangkan objek wisata. Manajemen yang baik mencakup banyak hal, seperti pelayanan wisatawan, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan fasilitas yang memadai. Fokus pada aspek ini penting untuk menciptakan pengalaman yang positif bagi pengunjung. Selain manajemen, promosi menjadi faktor kunci untuk menarik wisatawan. Tanpa promosi yang baik, potensi wisata yang dimiliki desa tidak akan diketahui luas oleh masyarakat atau wisatawan, baik lokal maupun internasional. Meskipun ada potensi wisata di desa tersebut, daya tarik wisata yang ditawarkan masih terbatas. Kota Bunga Malino dan Balla Lompoa menjadi destinasi utama unggulan, namun keduanya memiliki daya tarik yang terbatas, terutama jika dibandingkan dengan desa wisata yang berada di Pulau Jawa yang sudah menawarkan paket wisata yang lebih lengkap. Misalnya Desa wisata Wukirsari, Bantul Yogyakarta sudah lebih berkembang dalam hal paket wisata yang ditawarkan, termasuk berbagai atraksi wisata, agrowisata, wisata budaya yang dikemas secara menarik. Kemudian Desa Wisata Ponggok, yang terletak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, telah menjadi salah satu contoh sukses dalam pengembangan desa wisata yang mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) miliaran rupiah. Salah satu kunci keberhasilan Desa

Wisata Ponggok adalah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat setempat dilibatkan dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program.

## **B. Penguatan Struktur Sosial dan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)**

Tahap kedua dalam konstruksi sosial pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan komunitas integratif berfokus pada penguatan struktur sosial dan kelembagaan yang mendukung pengelolaan wisata. Pada tahap ini, potensi dan gagasan yang telah diidentifikasi pada tahap eksternalisasi mulai diimplementasikan menjadi struktur, norma, dan sistem yang nyata dalam masyarakat. Tahap ini bertujuan untuk menciptakan landasan kelembagaan yang kokoh agar desa wisata dapat berkembang secara berkelanjutan. Penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sangat penting karena kelompok ini akan menjadi aktor utama dalam menjalankan, mengelola, dan mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan. Tujuan dari objektivasi adalah untuk memastikan bahwa struktur sosial dan kelembagaan desa mampu bekerja secara efektif, berkelanjutan, dan inklusif.

Pada tahap ini, objektivasi diwujudkan melalui penguatan struktur sosial dan kelembagaan desa wisata. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa interaksi sosial dan gagasan yang terbentuk dalam tahap eksternalisasi dapat dioperasionalkan secara sistematis. Tahap ini mencakup pembentukan organisasi formal, penguatan fungsi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan.

atau anggota, serta mensukseskan pembangunan tempat pariwisata di seluruh Indonesia terkhusus pada desa wisata. Mengembangkan desa wisata mulai dari memanfaatkan potensi wisata, menciptakan produk-produk untuk peluang usaha wisata, membangun fasilitas umum pada tempat-tempat wisata, hingga mengembangkan sumber daya manusia.

Pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan komunitas, pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi langkah awal yang sangat penting. Sebagai wadah partisipasi aktif masyarakat, Pokdarwis menjadi motor penggerak dalam menciptakan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga dan mengelola potensi wisata.

Hal itu menunjukkan proses transisi dari keberadaan perkumpulan informal menuju pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai sebuah kelembagaan resmi yang terstruktur pada desa wisata Pao. Sebelum adanya Pokdarwis, masyarakat desa sudah memiliki perkumpulan yang berorientasi pada kelompok mahasiswa desa Pao yang kuliah di Kota Makassar dan kelompok pecinta alam. Namun, kegiatan mereka belum secara khusus diarahkan pada pengelolaan potensi wisata desa. Ketika desa mulai mengembangkan wisata sebagai salah satu program prioritas, dibutuhkan wadah yang lebih fokus dan terorganisasi untuk menangani hal tersebut. Arahan dari pemerintah desa kemudian mendorong pembentukan Pokdarwis dengan tugas utama mengelola objek wisata yang sudah ada. Pada tahap awal pembentukan Pokdarwis, keanggotaan cenderung berasal dari kelompok kecil yang sudah aktif mengelola objek wisata tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Pokdarwis masih dalam tahap awal pengembangan dan perlu diperluas untuk melibatkan lebih banyak elemen masyarakat desa. Dukungan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam pembentukan Pokdarwis, baik melalui arahan resmi maupun penyediaan legitimasi kelembagaan. Langkah ini memberikan dasar hukum dan arah yang jelas bagi kelompok ini untuk menjalankan fungsinya.

Latar belakang pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan proses pengorganisasiannya di Desa Bissoloro, yang dimulai dari inisiatif masyarakat setempat untuk mengelola potensi alam desa, khususnya hutan pinus kepada pihak Kementerian Kehutanan dan Dinas Lingkungan hidup Provinsi Sulsel. Kelompok yang ada sebelumnya, yang terdiri dari individu dengan minat pada pengelolaan lingkungan dan wisata, menjadi landasan pembentukan Pokdarwis. Sebelum resmi menjadi Pokdarwis, sudah ada kelompok informal yang berinisiatif untuk mengelola hutan pinus, menunjukkan adanya kesadaran awal masyarakat terhadap potensi wisata lokal. Kelompok ini menjadi cikal bakal Pokdarwis karena sudah memiliki pengalaman dalam pengelolaan sumber daya lokal. Ketua Pokdarwis dipilih berdasarkan kesepakatan anggota kelompok. Penunjukan ini mencerminkan proses yang demokratis dan berbasis pada pengakuan akan pengalaman dan kapabilitas seseorang. Proses ini memperkuat struktur kelembagaan yang memungkinkan kelompok untuk lebih terorganisir, terutama dalam menjalankan tugas yang lebih kompleks di masa mendatang. Potensi besar dalam pengembangan kelembagaan berbasis komunitas, dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya manusia lokal.

Kita bisa melihat bagaimana proses pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di desa terkadang dilakukan dengan pendekatan praktis, yaitu melalui penunjukan langsung oleh pihak pemerintah desa berdasarkan lokasi potensi wisata. Dalam hal ini, ketua Pokdarwis ditunjuk karena objek wisata utama, Batu Manrusu, berada di wilayah tanggung jawabnya. Kepala desa memiliki peran sentral dalam membentuk dan memberikan arahan kepada Pokdarwis. Penunjukan langsung oleh kepala desa menunjukkan adanya kepercayaan terhadap individu yang dianggap mampu memimpin dan mengelola kelompok tersebut. Proses pembentukan Pokdarwis tidak hanya melibatkan mekanisme formal seperti pemilihan internal, tetapi juga keputusan langsung dari pemerintah desa yang mempertimbangkan aspek

sekitar objek wisata mulai membuka kios-kios sebagai sarana untuk menjual produk lokal, dan ibu-ibu mulai menitipkan kue-kue mereka di warung-warung sekitar. Gotong royong yang semakin meluas ini mencerminkan kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kelestarian objek wisata, yang juga berfungsi sebagai daya tarik bagi pengunjung. Keberhasilan pembangunan desa wisata tidak hanya bergantung pada aspek fisik, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi sosial yang tinggi dari masyarakat. Meskipun tantangan seperti pengelolaan sampah masih ada, upaya kolaboratif dan edukasi terhadap pengunjung menjadi langkah penting untuk memastikan kebersihan dan keberlanjutan objek wisata. Untuk mendorong diversifikasi peran masyarakat dalam pengelolaan objek wisata juga telah didorong kelompok masyarakat bidang usaha mikro untuk ambil bagian.

Upaya mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi lokal yang lebih luas, guna mendukung keberadaan objek wisata secara berkelanjutan. Masyarakat didorong untuk memanfaatkan peluang yang ada melalui usaha kecil, seperti pembuatan suvenir dari kelompok seni *Pao Art*. Upaya ini tidak hanya menambah daya tarik bagi pengunjung, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi kepada warga. Peluangnya ada. Adanya permintaan pengunjung untuk penginapan menunjukkan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh warga dengan menyediakan rumah-rumah mereka sebagai penginapan berbasis komunitas (*homestay*). Hal ini membantu memenuhi kebutuhan wisatawan, sekaligus menjadi sumber pendapatan tambahan bagi warga. Inisiatif ini mencerminkan pendekatan pembangunan wisata berbasis komunitas yang inklusif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pengelolaan wisata. Pentingnya diversifikasi ekonomi lokal dalam mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan usaha kecil, menyediakan penginapan berbasis warga, dan mengurangi ketergantungan pada satu objek wisata, desa dapat menciptakan

ekosistem wisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan strategi pemberdayaan komunitas yang kuat, di mana keberhasilan desa wisata menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Dalam memperkuat kelembagaan masyarakat, juga penting melibatkan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, maupun sektor swasta. Keterlibatan pihak-pihak ini tidak hanya menyediakan dukungan berupa pendanaan dan pelatihan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi strategis yang dapat mempercepat pengembangan desa wisata. Pemerintah daerah dapat memberikan pendampingan teknis dan regulasi yang mendukung pembentukan serta penguatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Lembaga pendidikan dapat berkontribusi melalui kegiatan pengabdian masyarakat, seperti memberikan pelatihan manajemen wisata, keterampilan berbahasa asing, atau promosi digital. Sementara itu, sektor swasta dapat menjalin kerja sama dalam bentuk sponsorship, pemasaran, atau investasi untuk pengembangan fasilitas dan infrastruktur pariwisata. Salah satu yang dilakukan pada penguatan kelembagaan desa wisata adalah sosialisasi *Sapta Pesona* oleh Dinas kebudayaan dan Pariwisata Sulsel.

Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan dan menanamkan prinsip *Sapta Pesona* sebagai panduan utama dalam pengelolaan desa wisata. *Sapta Pesona* meliputi tujuh elemen utama, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan, yang menjadi indikator penting dalam menciptakan pengalaman wisata berkualitas bagi pengunjung. Peserta sosialisasi diajari cara menjaga keramahan kepada wisatawan, memastikan keamanan, serta memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan desa sebagai daya tarik utama. Hal ini menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai tuan rumah yang aktif mendukung keberlanjutan desa wisata. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah minimnya keterlibatan masyarakat karena sosialisasi dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Makassar. Hal ini mengurangi peluang bagi warga desa

menangani hal tersebut. Arahan dari pemerintah desa kemudian mendorong pembentukan Pokdarwis dengan tugas utama mengelola objek wisata yang sudah ada. Pada tahap awal pembentukan Pokdarwis, keanggotaan cenderung berasal dari kelompok kecil yang sudah aktif mengelola objek wisata tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Pokdarwis masih dalam tahap awal pengembangan dan perlu diperluas untuk melibatkan lebih banyak elemen masyarakat desa. Dukungan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam pembentukan Pokdarwis, baik melalui arahan resmi maupun penyediaan legitimasi kelembagaan. Langkah ini memberikan dasar hukum dan arah yang jelas bagi kelompok ini untuk menjalankan fungsinya

Setelah terbentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), langkah berikutnya yang sangat penting adalah penguatan kelembagaan. Penguatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pokdarwis dapat mengetahui dan menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif dan berdampak pada kemajuan desa wisata. Tahap awal penguatan kelembagaan, seluruh anggota perlu memahami konsep dasar Pokdarwis, Pokdarwis tidak hanya bertanggung jawab terhadap operasional objek wisata, tetapi juga sebagai motor penggerak kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pariwisata berkelanjutan pada lingkup desa wisata. Penguatan kelembagaan adalah fondasi bagi keberhasilan Pokdarwis dalam menjalankan misinya. Dengan pemahaman yang baik tentang tujuan, fungsi, koordinasi yang kuat, dan pembagian tugas yang jelas, Pokdarwis menjadi aktor utama dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Pokdarwis mengadakan diskusi rutin untuk mengevaluasi apa saja daya tarik baru yang bisa ditawarkan kepada wisatawan dan bagaimana menambah nilai dari objek wisata yang sudah ada. Salah satunya dengan menambah spot foto yang menarik dalam area air terjun. Pokdarwis menjalin koordinasi dengan pemerintah desa untuk mencari solusi bersama, baik dalam bentuk bantuan melengkapi sarana

lebih baik tetapi juga memiliki arah yang jelas dalam mengembangkan potensi wisata desa mereka. Dengan adanya struktur organisasi yang solid dan pemahaman yang mendalam tentang tujuan pengembangan, masyarakat serta komunitas dapat bekerja sama secara efektif untuk mencapai visi bersama.

### **C. Peran Komunitas dalam Pengembangan Desa Wisata**

Tahap internalisasi dalam desain konstruksi sosial berbasis pemberdayaan komunitas berfokus pada upaya untuk memperdalam pemahaman, keterlibatan, dan keterampilan masyarakat. Pada tahap ini, tujuan utama adalah memastikan bahwa masyarakat tidak hanya terlibat dalam proses pengembangan desa wisata, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengelola dan memajukan desa wisata secara mandiri. Ini mencakup penguatan kapasitas individu dan kelompok, serta membangun jejaring eksternal yang mendukung keberlanjutan desa wisata.

Tahap internalisasi merupakan proses penting dalam konstruksi sosial pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan komunitas. Pada tahap ini, nilai-nilai, pemahaman, dan komitmen terhadap pengelolaan desa wisata ditanamkan ke dalam komunitas, sehingga setiap individu merasa memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan program. Internalisasi menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat melalui pendekatan ini, pengelolaan desa wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga tertentu, seperti Pokdarwis, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Dengan internalisasi yang efektif, masyarakat tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga pemilik dari pengembangan desa wisata. Hal ini memungkinkan terciptanya rasa kepemilikan kolektif, solidaritas sosial, dan semangat bersama untuk memaksimalkan potensi desa wisata secara berkelanjutan. Internalisasi mencakup tiga aspek utama, yaitu: pelibatan komunitas, penguatan kapasitas, dan pembangunan jejaring eksternal.

melibatkan diri dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam pembangunan sosial dan budaya. Dengan adanya kesepakatan bersama, mereka dapat merumuskan visi dan misi yang jelas untuk masa depan desa wisata, yang selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Keterlibatan aktif masyarakat merupakan prinsip utama dalam pengembangan desa wisata yang sukses. Keterlibatan masyarakat bukan hanya sebatas pada penyediaan sumber daya alam atau tempat, tetapi juga pada aktivitas dan atraksi wisata yang dijalankan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton atau penerima manfaat dari wisata, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata. Hal ini menggarisbawahi pentingnya prinsip "dari masyarakat untuk masyarakat" dalam model pengembangan desa wisata. Tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dalam industri pariwisata. Banyak desa yang memiliki potensi wisata yang luar biasa, namun belum memiliki SDM yang terampil dalam mengelola dan mengembangkan wisata tersebut. Oleh karena itu, untuk mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan, pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui proses pemberdayaan sangat diperlukan.

Menekankan bahwa desa wisata membutuhkan keterlibatan seluruh simpul kelompok yang ada dalam masyarakat, mulai dari kelompok masyarakat, kelompok pemuda, kelompok perempuan, hingga kelompok adat atau komunitas lainnya. Dalam hal ini, kepala desa berperan sebagai pemersatu dan penggerak, yang mendorong setiap kelompok untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Hal ini juga terkait dengan pentingnya koordinasi antar pihak, seperti antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor terkait lainnya. Ketokohan dan kemampuan kepala desa dalam memimpin sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan berbagai program di desa, termasuk dalam pengembangan desa wisata. Kepala desa tidak

masyarakat telah dilakukan baik itu tingkat desa dan kabupaten, sehingga yang diperlukan saat ini bagaimana hasil dari pelatihan-pelatihan tersebut bisa dijalankan.

Pemberdayaan melalui pelatihan ini memang bertujuan untuk memberikan stimulus bagi masyarakat agar lebih produktif, terutama dalam sektor pariwisata. Namun, meskipun demikian, ada kendala struktural yang menghambat fokus penuh pada pengembangan wisata diantaranya bagaimana berbagai pelatihan yang sudah dilakukan itu dapat menjadi stimulus. Meskipun pengembangan desa wisata merupakan peluang yang sangat potensial untuk meningkatkan perekonomian desa, namun kebutuhan dasar masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi, seperti memastikan swasembada pangan yang cukup dan mengatasi masalah gizi buruk (stunting), menjadi penghalang bagi alokasi lebih banyak sumber daya untuk sektor pariwisata. Program-program tersebut masih memerlukan perhatian lebih banyak, karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam sektor lainnya, termasuk pariwisata.

Menurut narasumber, program pemberdayaan yang telah dilaksanakan selama ini masih terkesan seremonial, atau hanya dijalankan sebagai kegiatan formal yang tidak membawa perubahan signifikan bagi masyarakat. Meskipun ada upaya pemberdayaan, program-program tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat desa. Pentingnya kepekaan terhadap kebutuhan nyata masyarakat di tingkat desa, terutama terkait dengan desa wisata. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya desa wisata sebagai peluang ekonomi masih sangat kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa proses internalisasi atau pemahaman terhadap manfaat desa wisata dan bagaimana cara mengelolanya dengan baik belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan desa wisata, selain adanya program pemberdayaan, diperlukan pula kesadaran yang lebih

mendalam dari masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata.

Pada tahap internalisasi ini, selain melibatkan komunitas dalam setiap proses pengembangan desa wisata, membangun jejaring eksternal juga merupakan langkah penting yang perlu dilakukan. Jejaring eksternal merujuk pada hubungan yang dibangun dengan berbagai pihak di luar komunitas desa, seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah (LSM), pelaku industri pariwisata, media, dan pihak swasta yang bisa memberikan dukungan kepada pengembangan desa wisata. Jejaring eksternal memainkan peran yang sangat penting dalam memperluas cakupan pengembangan desa wisata, karena dapat memberikan berbagai manfaat yang diperlukan untuk mempercepat kemajuan desa. Salah satu manfaat utama adalah akses ke sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan, pengetahuan, maupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam sektor pariwisata.

Dengan menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintah, desa wisata dapat memperoleh dukungan dalam bentuk pendanaan dan program-program pemerintah yang ditujukan untuk mendorong pembangunan desa wisata. Selain itu, pemerintah juga bisa berperan dalam membantu memperbaiki infrastruktur yang diperlukan agar objek wisata lebih mudah diakses oleh pengunjung. Perguruan tinggi dan LSM dapat berkontribusi dengan memberikan pelatihan, kajian, dan bimbingan teknis, yang akan meningkatkan kapasitas manajerial dan pengetahuan masyarakat setempat mengenai pengelolaan desa wisata yang baik dan berkelanjutan.

Walaupun demikian, komunitas pun tidak bisa berharap banyak dari pendanaan pemerintah. Terkait dengan janji bantuan dari pemerintah setelah kunjungan Menteri Pariwisata ke desa mereka. Masyarakat merasa bahwa kunjungan Menteri ke desa mereka merupakan kesempatan besar untuk mempromosikan desa wisata mereka, karena kunjungan tersebut dapat membawa perhatian lebih dari pemerintah pusat dan daerah. Namun, meskipun proposal bantuan dana telah

diserahkan, komunitas merasa heran karena hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas mengenai bantuan yang dijanjikan. Banyak factor seperti ketersediaan anggaran dan tidak masuk pada skala prioritas. Selain itu, hal ini juga mencerminkan tantangan yang sering dihadapi oleh masyarakat desa dalam mengakses bantuan atau dukungan dari pemerintah, baik itu karena prosedur yang panjang, masalah birokrasi, atau kurangnya koordinasi antara tingkat pemerintah yang berbeda. Penting bagi pihak desa dan pokdarwis untuk terus berkomunikasi dengan pihak yang berwenang, mengikuti prosedur yang diperlukan, serta memastikan bahwa komitmen yang diberikan tidak hanya sebatas janji, tetapi juga diikuti dengan tindakan nyata. Dialog yang berkelanjutan antara masyarakat desa dan pihak eksternal, seperti pemerintah, akan sangat membantu dalam mempercepat proses pengembangan desa wisata dan meningkatkan keberlanjutan program-program yang telah direncanakan.

Secara keseluruhan, kerjasama yang dijalin dengan Poltekpar ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara sektor akademik dan masyarakat desa dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam mempercepat proses pengembangan desa wisata, meningkatkan kapasitas pengelola, dan mendapatkan informasi terbaru dan peluang-peluang baru untuk kemajuan desa. Keberlanjutan kerjasama ini dapat menjadi model yang efektif bagi desa wisata, dimana perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai pendamping atau fasilitator, memberikan bimbingan teknis dan membangun kapasitas masyarakat desa. Hubungan antara akademisi dan masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang memberikan pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra yang bekerja bersama dalam mengidentifikasi solusi terhadap tantangan-tantangan yang ada di lapangan.

Sementara itu, pelaku industri pariwisata yang termasuk dalam kategori operator tour, hotel, restoran, dan agensi perjalanan dapat menjadi mitra strategis dalam memasarkan dan memperkenalkan desa wisata ke pasar yang lebih luas.

Namun hal ini belum tersentuh dan dilakukan, padahal kerjasama dengan mereka dapat membuka akses ke jaringan pasar yang lebih besar, sekaligus meningkatkan visibilitas desa wisata di kalangan wisatawan domestik maupun internasional. Jejaring dengan media juga sangat berperan dalam promosi desa wisata, sehingga lebih banyak orang mengetahui potensi yang ada dan tertarik untuk mengunjungi. Namun, kesiapan objek wisata tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kesiapan desa dari segi sarana pendukung, atraksi wisata yang ditawarkan, serta aspek pengelolaan dan promosi. Sarana pendukung seperti akses jalan, fasilitas umum, dan layanan dasar bagi pengunjung harus tersedia untuk menjamin kenyamanan wisatawan.

Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sulawesi Selatan untuk menjalin kerja sama dalam mendukung pengembangan destinasi wisata, termasuk di Kabupaten Gowa. Mereka telah membangun jejaring yang kuat dengan berbagai vendor dan memiliki pengalaman dalam menangani wisatawan di destinasi populer seperti Bulukumba, Selayar, Toraja, dan Maros. Pentingnya kesiapan destinasi wisata, baik dari segi pengelolaan maupun promosi, agar menarik perhatian wisatawan dan memungkinkan kerja sama dengan komunitas pramuwisata. Frekuensi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gowa termasuk tinggi dengan total pengunjung 845.282 wisatawan pada tahun 2024 dari 3 objek wisata yaitu alam, buatan dan budaya. Destinasi unggulan Malino tetap menjadi primadona dengan 217.112 pengunjung, sedang untuk kategori buatan Wisata Kebun Bontomarannu 129.182 pengunjung dan objek wisata budaya Museum Balla lompoe 31.228 kunjungan. Frekuensi kunjungan wisatawan yang tinggi menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa memiliki daya saing dalam sektor pariwisata, terutama melalui kombinasi wisata alam, buatan, dan budaya. Kunjungan ke wisata budaya relatif lebih rendah dibandingkan kategori lainnya, sehingga diperlukan strategi promosi yang lebih intensif untuk meningkatkan daya tariknya. Sekaligus menjadi peluang bagi desa-desa wisata yang berada di

sekitar Malino dan Wisata Kebun Bontomarannu. Perlunya pengelolaan destinasi yang lebih baik, mencakup aspek atraksi wisata, fasilitas pendukung, dan strategi promosi yang efektif. Pramuwisata juga menekankan bahwa kolaborasi antara pengelola desa wisata dengan mereka dapat meningkatkan daya tarik destinasi melalui layanan profesional yang lebih terorganisasi.

Keterlibatan aktif masyarakat merupakan prinsip utama dalam pengembangan desa wisata yang sukses. Keterlibatan masyarakat bukan hanya sebatas pada penyediaan sumber daya alam atau tempat, tetapi juga pada aktivitas dan atraksi wisata yang dijalankan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton atau penerima manfaat dari wisata, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata. Hal ini menggarisbawahi pentingnya prinsip "dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat". Dalam model pengembangan desa wisata, tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keterampilan dalam industri pariwisata. Banyak desa yang memiliki potensi wisata yang luar biasa, namun belum memiliki SDM yang terampil dalam mengelola dan mengembangkan wisata tersebut. Oleh karena itu, untuk mewujudkan desa wisata yang berkelanjutan, pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui proses pemberdayaan sangat diperlukan.

Kepala desa berperan sebagai pemersatu dan penggerak, yang mendorong setiap kelompok untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Hal ini juga terkait dengan pentingnya koordinasi antar pihak, seperti antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor terkait lainnya. Ketokohan dan kemampuan kepala desa dalam memimpin sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keberhasilan berbagai program di desa, termasuk dalam pengembangan desa wisata. Kepala desa tidak hanya bertugas sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan dan menggerakkan masyarakat, aparat desa, serta pihak-pihak

lain yang terlibat. kepala desa dan aparat desa perlu memahami bahwa pengelolaan desa wisata harus berbasis pada potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.

Pada tahap internalisasi ini, selain melibatkan komunitas dalam setiap proses pengembangan desa wisata, membangun jejaring eksternal juga merupakan langkah penting yang perlu dilakukan. Jejaring eksternal merujuk pada hubungan yang dibangun dengan berbagai pihak di luar komunitas desa, seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah (LSM), pelaku industri pariwisata, media, dan pihak swasta yang bisa memberikan dukungan kepada pengembangan desa wisata. Jejaring eksternal memainkan peran yang sangat penting dalam memperluas cakupan pengembangan desa wisata, karena dapat memberikan berbagai manfaat yang diperlukan untuk mempercepat kemajuan desa. Salah satu manfaat utama adalah akses ke sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan, pengetahuan, maupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam sektor pariwisata.

Adapun dengan menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintah, desa wisata dapat memperoleh dukungan dalam bentuk pendanaan dan program-program pemerintah yang ditujukan untuk mendorong pembangunan desa wisata. Selain itu, pemerintah juga bisa berperan dalam membantu memperbaiki infrastruktur yang diperlukan agar objek wisata lebih mudah diakses oleh pengunjung. Perguruan tinggi dan LSM dapat berkontribusi dengan memberikan pelatihan, kajian, dan bimbingan teknis, yang akan meningkatkan kapasitas manajerial dan pengetahuan masyarakat setempat mengenai pengelolaan desa wisata yang baik dan berkelanjutan.

Pelaku industri pariwisata yang termasuk dalam kategori *operator tour*, hotel, restoran, dan agensi perjalanan dapat menjadi mitra strategis dalam memasarkan dan memperkenalkan desa wisata ke pasar yang lebih luas. Namun hal ini belum tersentuh dan dilakukan, padahal kerjasama dengan mereka dapat membuka akses ke jaringan pasar yang lebih besar, sekaligus meningkatkan visibilitas desa wisata di

kalangan wisatawan domestik maupun internasional. Jejaring dengan media juga sangat berperan dalam promosi desa wisata, sehingga lebih banyak orang mengetahui potensi yang ada dan tertarik untuk mengunjungi. Namun, kesiapan objek wisata tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kesiapan desa dari segi sarana pendukung, atraksi wisata yang ditawarkan, serta aspek pengelolaan dan promosi. Sarana pendukung seperti akses jalan, fasilitas umum, dan layanan dasar bagi pengunjung harus tersedia untuk menjamin kenyamanan wisatawan.

Frekuensi kunjungan wisatawan yang tinggi menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa memiliki daya saing dalam sektor pariwisata, terutama melalui kombinasi wisata alam, buatan, dan budaya. Kunjungan ke wisata budaya relatif lebih rendah dibandingkan kategori lainnya, sehingga diperlukan strategi promosi yang lebih intensif untuk meningkatkan daya tariknya. Sekaligus menjadi peluang bagi desa-desa wisata yang berada di sekitar Malino dan Wisata Kebun Bontomarannu. Perlunya pengelolaan destinasi yang lebih baik, mencakup aspek atraksi wisata, fasilitas pendukung, dan strategi promosi yang efektif. Pramuwisata juga menekankan bahwa kolaborasi antara pengelola desa wisata dengan mereka dapat meningkatkan daya tarik destinasi melalui layanan profesional yang lebih terorganisasi.

#### **D. Aktivasi Program Pemberdayaan Desa Wisata**

Tahap aktivasi merupakan langkah konkret dalam mengimplementasikan konstruksi sosial berbasis pemberdayaan komunitas berfokus pada rencana pengembangan desa wisata yang telah disusun. Setelah melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, aktivasi bertujuan untuk mewujudkan program-program yang telah direncanakan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif dan komunitas sebagai penggerak. Pada tahap ini, masyarakat yang sudah terlibat dalam proses identifikasi, pemetaan, pembentukan hingga penguatan

Tahapan dalam aktivasi mencakup beberapa langkah strategis untuk memastikan program pengembangan desa wisata berjalan efektif. Langkah pertama adalah penyiapan fasilitator yang akan mendampingi komunitas desa. Fasilitator ini bertugas sebagai pendamping yang mampu memotivasi, memberikan arahan, dan membantu masyarakat desa dalam mengimplementasikan rencana pengembangan desa wisata. Fasilitator memiliki peran kunci dalam membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugasnya, fasilitator diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang konsep pemberdayaan masyarakat berbasis pariwisata.

Fasilitator yang efektif seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengembangan desa wisata, tidak hanya terbatas pada aspek administratif. Fasilitator perlu memiliki keterampilan dan wawasan terkait dengan potensi desa, serta program-program yang dapat diaplikasikan langsung untuk meningkatkan daya tarik desa wisata. Pengalaman pelatihan atau pengembangan tidak hanya perlu fokus pada administrasi atau kegiatan yang berlangsung di hotel, tetapi juga harus mengedepankan pengelolaan dan pemanfaatan potensi alam secara langsung. Sehingga, fasilitator dapat membantu masyarakat memahami cara memanfaatkan sumber daya alam mereka secara optimal untuk pengembangan wisata, seperti mengadakan kegiatan atau pelatihan di alam terbuka yang lebih relevan dengan konsep desa wisata berbasis alam.

Selanjutnya, dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan berbasis pariwisata, yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang mendukung pengelolaan wisata secara berkelanjutan. Program ini melibatkan penguatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, seperti pelatihan manajemen wisata, pengelolaan lingkungan, hingga strategi promosi.

Hal itu menunjukkan upaya yang telah dilakukan oleh komunitas dalam mengelola objek wisata di desa. Manajemen

wisata sudah berjalan, dengan pembagian tugas kepada masing-masing anggota kelompok agar setiap orang memiliki peran yang jelas dalam pengelolaan. Promosi objek wisata juga berjalan dengan baik melalui berbagai akun media sosial, meskipun masih ada tantangan, yaitu masalah sampah yang belum dikelola dengan optimal. Sampah yang sering dibuang atau dibakar menjadi isu utama yang perlu segera diatasi. Komunitas memiliki inisiatif mendorong terbentuknya bank sampah sebagai solusi untuk mengelola sampah dengan lebih efektif.

Gambar 5.19  
Tempat Sampah Hutan Pinus



Sumber : Dokumentasi penulis, 2024

Menggendeng Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gowa untuk mengadakan bank sampah atau menyediakan kontainer sampah adalah langkah yang sangat strategis dan bermanfaat dalam upaya mengatasi sampah dan pengelolaan lingkungan secara lebih efektif di desa wisata. Dinas Lingkungan Hidup dapat membantu menyediakan kontainer sampah di lokasi strategis di sekitar objek wisata. Ini akan memudahkan pengunjung dan masyarakat untuk membuang sampah dengan benar, serta mengurangi potensi sampah dibuang sembarangan atau dibakar. Dinas Lingkungan Hidup juga dapat membantu mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat dan pengunjung tentang cara-cara pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, seperti pemilahan sampah organik dan non-organik, dan tindaklanjut bisa didaur ulang. Ini juga

lebih kuat, di mana masyarakat bersama-sama memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan bersama.

Kunci kemajuan desa, baik dari sisi kesejahteraan masyarakat maupun pengembangan wisata, adalah kolaborasi menyeluruh dari semua unsur komunitas desa. Peserta mengidentifikasi bahwa potensi aktor lokal sangat beragam, mulai dari kelompok pemuda, pengusaha lokal, hingga lembaga pendidikan berbasis pesantren, yang semuanya bisa berkontribusi aktif dalam pengembangan desa wisata.

Awal tahun 2000-an, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan, terutama di daerah pedesaan. Banyak desa yang terjebak dalam siklus kemiskinan, dengan akses terbatas terhadap sumber daya dan layanan dasar. Pemerintah Indonesia menyadari perlunya pendekatan baru yang lebih inklusif untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pada tahun 2007, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Program ini merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya, seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Dengan tujuan utama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, PNPM Mandiri Pedesaan berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

PNPM Mandiri mengedepankan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap program. Mereka diberi kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan solusi yang sesuai dengan konteks lokal. Melalui kelompok usaha bersama (KUB) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), masyarakat dapat mengelola dana yang disediakan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi lainnya. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan irigasi,

tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan keterampilan dan akses ke modal, PNPM Mandiri membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro dan meningkatkan pendapatan mereka. Dampak positif dari program ini terlihat jelas, dengan banyak desa yang mengalami peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan.

Seiring berjalannya waktu, PNPM Mandiri Pedesaan terus bertransformasi. Pada tahun 2014, program ini beralih menjadi Program Inovasi Desa (PID), yang lebih menekankan pada inovasi dan pengembangan desa secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, pemerintah mendorong desa untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, memanfaatkan potensi lokal yang ada. Transformasi ini kemudian melahirkan kebijakan Dana Desa, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa memberikan alokasi anggaran langsung kepada desa untuk digunakan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap desa berhak menerima dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan adanya Dana Desa, desa memiliki keleluasaan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini menciptakan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

Di tengah berbagai program pemberdayaan yang telah diluncurkan, mulai dari PNPM Mandiri Pedesaan hingga Dana Desa, serta dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan lembaga swasta, masyarakat desa dan komunitas telah memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan peluang. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengakumulasi dan mengaktifkan program-program ini untuk

implementasi program. Evaluasi berkelanjutan dalam pemberdayaan komunitas dan pengembangan desa wisata memberikan kesempatan untuk merefleksikan proses yang telah dilalui dan hasil yang telah dicapai. Melalui evaluasi ini, pihak-pihak terkait dapat menilai apakah tujuan awal desa wisata telah tercapai, serta mengidentifikasi apakah ada hambatan yang menghalangi kemajuan. Evaluasi juga memungkinkan untuk mengetahui apakah pendekatan yang digunakan, baik dalam hal pemberdayaan masyarakat maupun pengelolaan sumber daya wisata, sudah sesuai dengan harapan atau perlu disesuaikan.

Salah satu aspek yang perlu dievaluasi adalah sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan desa wisata. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa desa wisata benar-benar dibangun dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Selain itu, evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang digunakan sebagai daya tarik wisata juga sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan kelestarian objek wisata yang ada. Sekaitan partisipasi aktif masyarakat.

Tantangan sosial dalam mengembangkan desa wisata, yaitu kurangnya kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap potensi yang dimiliki pada desa tersebut. Ketika masyarakat masih pesimis dan belum menganggap desa wisata sebagai peluang, hal ini dapat memperlambat proses pengembangan dan pemberdayaan yang seharusnya melibatkan semua pihak. Walaupun misalnya objek wisata tersebut tidak berada disekitar tempat tinggalnya. Sebagian masyarakat mungkin masih lebih fokus pada sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan kecil, atau pekerjaan lain yang dianggap lebih stabil. Mereka belum melihat wisata sebagai sumber pendapatan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi mereka secara langsung. Pemberdayaan komunitas menjadi kunci utama untuk mengubah pola pikir yang pesimis menjadi optimis. Dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan

desa wisata, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjadikan desa wisata sebagai peluang yang menguntungkan. Pengembangan desa wisata tidak hanya membutuhkan perencanaan fisik, tetapi juga pendekatan sosial yang mampu meningkatkan kesadaran dan mengubah pandangan masyarakat terhadap potensi yang ada didesa termasuk potensi alam dan sumber daya yang dimiliki.

Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pengelola desa wisata dapat mempelajari praktik-praktik terbaik yang telah dilaksanakan, serta mengatasi tantangan yang muncul dalam perjalanan pengembangan desa wisata. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan, perbaikan program, serta pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, sehingga pengembangan desa wisata dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat.

Evaluasi dalam pengembangan desa wisata cenderung dilakukan secara informal, berbasis pada masukan dari pihak internal komunitas dan pengunjung. Masukan tersebut menjadi acuan bagi pengelola untuk memperbaiki sarana pendukung wisata dan meningkatkan pengalaman kunjungan. Evaluasi di tingkat desa juga dilakukan melalui mekanisme formal, seperti di kantor desa, dengan cakupan yang lebih luas, mencakup keseluruhan program yang telah terealisasi. Namun, pendekatan evaluasi ini tampaknya masih bersifat umum dan belum terfokus secara khusus pada pengembangan desa wisata. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada upaya untuk menerima kritik dan saran, masih diperlukan pendekatan evaluasi yang lebih sistematis, terencana, dan spesifik, agar hasil evaluasi tidak hanya menjadi masukan tetapi juga dapat diterjemahkan ke dalam langkah-langkah strategis untuk pengembangan lebih lanjut. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam evaluasi juga akan meningkatkan rasa memiliki dan dukungan terhadap program desa wisata.

Evaluasi berkelanjutan merupakan elemen penting dalam pengembangan desa wisata yang bertujuan untuk memastikan

yang jelas dan berkelanjutan dalam mengelola desa wisata dikarenakan pengelolaan yang baik dan terencana sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang. Serta dibutuhkan tanggung jawab, kepemimpinan yang kuat dan *political will* dari Kepala Desa dan pengelola untuk memastikan bahwa inisiatif dan program yang telah direncanakan dapat dilanjutkan dengan baik.

Kepemimpinan kepala desa menjadi faktor kunci dalam mendorong keberlanjutan dan kemajuan pengembangan desa wisata. Kepala desa dipandang memiliki otoritas strategis untuk menggerakkan masyarakat ("massanya") dan menetapkan kebijakan anggaran yang mendukung sektor pariwisata.

Tabel 5.7  
Kondisi Desa Wisata

Aspek	Desa Wisata		
	Belapunrangan	Pao	Bissoloro
Objek wisata	Air Terjun Batu Manrusu	Air Terjun Bantimurung Gallang	Hutan Pinus, Camping Ground selow, Rita Malompoa, Moncong Sipolong, Suaraka Tinambung dll
Kondisi	Tidak ada aktivitas wisata, partisipasi masyarakat minim, potensi konflik	Eksis dan dikelola oleh pokdarwis	Eksis dan terus berkembang dimiliki oleh pribadi/komunitas
Kepemilikan	Lahan milik pribadi dan	Lahan milik desa, masuk	Lahan milik negara, hak

	Kerjasama pemdes untuk akses jalan dan parkir	ke PAD desa	pengelolaan ke individu dan komunitas
Pendanaan	Pribadi dan hasil objek wisata	Biaya tiket masuk Bantuan pembiayaan APBDes dan Dana Alokasi Khusus	Individu/komunitas

Sumber : Olahan penulis, 2024

Pengembangan desa wisata berkelanjutan merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi lokal secara optimal, sambil menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Mantiri et al., 2024). Evaluasi berkelanjutan menjadi elemen kunci yang tidak hanya berfungsi untuk menilai keberhasilan program desa wisata, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan tetap relevan dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Evaluasi membantu dalam mengukur dampak dari program pengembangan desa wisata terhadap masyarakat lokal, lingkungan, dan ekonomi. Dengan memahami dampak ini, pengelola dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk perbaikan di masa depan. Pemerintah desa dapat memberikan regulasi yang tetap untuk menunjang pembangunan desa wisata. Evaluasi berkelanjutan memberikan kesempatan bagi masyarakat dan komunitas untuk terlibat dalam proses penilaian. Dengan melibatkan masyarakat, evaluasi dapat mencerminkan perspektif dan kebutuhan mereka, sehingga hasilnya lebih relevan dan bermanfaat. Dalam perkembangan yang terus berubah, evaluasi berkelanjutan memungkinkan

pengelola untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang baru pada objek wisata. Sehingga perubahan dan program dapat diadaptasi dan diubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pariwisata saat yang membutuhkan banyak inovasi dan pengalaman baru (Mulyani, 2021).

Evaluasi tingkat desa dalam hal dilakukana melalui musyawarah desa yang diinisiasi oleh Badan Permusyawaratan desa (BPD). Musyawarah Desa dihadiri oleh pemerintah desa, supra desa dan unsur dari masyarakat. Untuk konteks desa wisata ini dihadiri oleh komunitas sadar wisata (Pokdarwis) dan kelompok lainnya yang berkaitan. Sebelum mengikuti musyawarah desa, unsur komunitas terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan komunitasnya untuk dibawa bawa forum musyawarah desa. Di tengah upaya pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, Musyawarah Desa menjadi salah satu forum penting yang diinisiasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Forum ini tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai pihak, tetapi juga berfungsi sebagai wadah untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan. Dalam konteks ini, Musyawarah Desa dihadiri oleh pemerintah desa, unsur supradesa, dan masyarakat, termasuk komunitas sadar wisata (Pokdarwis) serta kelompok-kelompok lain yang berkaitan dengan pengembangan wisata. Sebelum mengikuti Musyawarah Desa, unsur komunitas, seperti Pokdarwis, mengadakan pertemuan internal. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu yang relevan dan merumuskan masukan yang akan dibawa ke forum musyawarah. Dengan cara ini, suara dan aspirasi masyarakat dapat terwakili dengan baik, sehingga mereka merasa memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Musyawarah Desa memiliki beberapa tujuan penting dalam konteks evaluasi. Pertama, forum ini memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menilai sejauh mana program pengembangan desa wisata telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Diskusi yang berlangsung dapat mencakup berbagai aspek, seperti jumlah pengunjung, dampak ekonomi,

dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, Musyawarah Desa juga berfungsi untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata. Melalui dialog terbuka, peserta dapat berbagi pandangan dan pengalaman mereka, sehingga masalah yang mungkin tidak terlihat dapat diungkap dan dibahas secara kolektif. Ini termasuk kendala dalam pengelolaan, promosi, dan partisipasi masyarakat yang mungkin menghambat kemajuan program. Selama musyawarah, penting bagi pemerintah desa untuk menyajikan data dan informasi terkait program yang telah dilaksanakan. Dengan memberikan gambaran yang jelas tentang hasil evaluasi sebelumnya, peserta dapat lebih memahami konteks dan dampak dari program yang ada. Diskusi terbuka dan presentasi data ini mendorong partisipasi aktif dari semua peserta, menciptakan suasana yang inklusif dan kolaboratif.

Setelah Musyawarah Desa, langkah tindak lanjut menjadi sangat krusial. Rencana aksi harus disusun berdasarkan masukan dan saran yang diperoleh selama musyawarah. Rencana ini harus mencakup langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi, serta menetapkan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi secara berkala. Dengan cara ini, program dapat tetap pada jalurnya dan disesuaikan jika diperlukan. Penting juga untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dengan menyusun laporan hasil Musyawarah Desa dan tindak lanjut yang dilakukan. Laporan ini harus disampaikan kepada masyarakat, sehingga mereka tetap terinformasi dan merasa terlibat dalam proses pengembangan desa.

Melalui Musyawarah Desa yang diinisiasi oleh BPD, evaluasi di tingkat desa dapat dilakukan secara efektif. Forum ini tidak hanya memberikan gambaran yang komprehensif tentang keberhasilan program, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan partisipatif ini, diharapkan

#### **D. Prinsip-Prinsip Pengembangan Desa Wisata**

Prinsip-prinsip disusun dengan merujuk pada fenomena konstruksi sosial pengembangan berkelanjutan desa wisata berbasis pemberdayaan komunitas integratif di Kabupaten Gowa. Dengan menggunakan perspektif sosiologi pembangunan, pariwisata, dan pemberdayaan komunitas, dalil-dalil ini menjadi pijakan untuk menguraikan proses-proses sosial yang melatarbelakangi pengembangan desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan :

1. Pola partisipasi komunitas dalam pengembangan desa wisata memperlihatkan kedalaman dinamika sosial dalam proses pembangunan berbasis masyarakat. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa tidak semua partisipasi masyarakat merupakan partisipasi murni yang sejati. Terdapat tiga bentuk partisipasi yang berhasil diidentifikasi, yaitu: partisipasi semu, partisipasi teknis, dan partisipasi aktif. Partisipasi semu bersifat simbolik, di mana masyarakat seolah-olah dilibatkan dalam program pembangunan, namun sebenarnya tidak memiliki kuasa dalam menentukan arah kegiatan. Bentuk partisipasi ini lebih menonjolkan aspek legitimasi formal daripada pemberdayaan substantif. Partisipasi teknis menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam aspek-aspek operasional, seperti pelaksanaan kegiatan atau pemanfaatan sumber daya, tetapi mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis yang menentukan arah dan tujuan pembangunan desa wisata. Sementara itu, partisipasi aktif merupakan bentuk partisipasi sejati, di mana masyarakat tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga pengambil keputusan utama. Dalam partisipasi aktif, komunitas memiliki kontrol terhadap program pembangunan, dan pemerintah bertindak hanya sebagai fasilitator atau pengawas (kontrol), bukan sebagai pengambil keputusan.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa wisata tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah yang harus dipecahkan. Sebaliknya, pemberdayaan harus

dipahami sebagai sebuah proses pembelajaran sosial yang berkelanjutan di dalam komunitas. Melalui proses ini, masyarakat secara kolektif membangun kapasitas diri, memperluas kesadaran kritis, serta mengembangkan kontrol terhadap sumber daya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat tidak sekadar merupakan intervensi proyek yang bersifat sementara, melainkan merupakan proses transformasi sosial yang mendalam. Dalam konteks ini, proses belajar mencakup kemampuan masyarakat untuk mengenali potensi yang dimiliki, mengambil keputusan secara mandiri, serta mengelola sumber daya dan konflik internal secara berkelanjutan. Transformasi pemberdayaan berlangsung secara bertahap melalui refleksi kritis dan pengalaman nyata dalam dinamika sosial sehari-hari. Pemahaman ini sekaligus mematahkan pola pikir lama yang memandang masyarakat desa sebagai obyek pasif pembangunan, yang "masalahnya harus diselesaikan" oleh pihak luar. Sebaliknya, masyarakat dilihat sebagai subyek aktif yang memiliki kapasitas untuk mentransformasikan dirinya melalui proses belajar sosial yang berkesinambungan.

3. Desain rekonstruksi sosial pemberdayaan komunitas dalam pengembangan desa wisata berlangsung melalui tahapan eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Dalam tahapan ini, masyarakat tidak hanya terlibat dalam identifikasi potensi lokal dan pembangunan struktur sosial yang mendukung, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai pemberdayaan sebagai bagian dari identitas sosial mereka. Dengan demikian, masyarakat bertransformasi menjadi aktor utama dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan, bukan sekadar penerima manfaat dari program-program eksternal. Untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari proses pemberdayaan ini, tahapan-tahapan tersebut disempurnakan dengan aktivasi dan evaluasi, yang menjadikan proses pemberdayaan sebagai siklus yang berkelanjutan. Melalui aktivasi, masyarakat

diberi kesempatan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan pengetahuan yang telah diperoleh dalam bentuk kegiatan nyata. Sementara itu, evaluasi memberikan ruang untuk refleksi dan penyesuaian agar program dapat terus berkembang seiring dengan dinamika dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini mengarah pada model baru dalam konstruksi sosial untuk pengembangan desa wisata yang berbasis pada keterlibatan komunitas secara integratif. Pendekatan integratif dalam konteks pemberdayaan komunitas desa wisata adalah sebuah model yang menggabungkan berbagai elemen sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan lingkungan untuk mengelola dan mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, seperti komunitas, pemerintah, swasta, lembaga akademis, dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, dengan melibatkan semua elemen masyarakat, pemberdayaan tidak hanya bersifat *top-down* atau *bottom-up*, tetapi menjadi proses kolektif yang menghasilkan perubahan sosial yang mendalam dan berkelanjutan.

## **BAB VII**

### **MODEL KAPASITASI SOSIAL INTEGRATIF UNTUK DESA WISATA BERKELANJUTAN**

Buku ini menemukan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata berkelanjutan di Kabupaten Gowa sangat dipengaruhi oleh pola keterlibatan komunitas. Pola tersebut mencakup partisipasi semu, partisipasi teknis, dan partisipasi aktif. Di antara ketiganya, partisipasi aktif terbukti menjadi kunci utama keberhasilan, karena menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai pelaksana kegiatan, melainkan sebagai subjek yang terlibat secara sadar dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan desa wisata.

Lebih lanjut, pemberdayaan komunitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, re-aktivasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta pelestarian budaya dan lingkungan menjadi faktor penting dalam memperkuat identitas desa wisata. Upaya-upaya ini tidak hanya mendorong penguatan kelembagaan lokal, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Gowa. Identitas desa wisata yang tumbuh dari nilai lokal dan kesadaran kolektif inilah yang menjadi fondasi keberlanjutan jangka panjang.

Di dalam buku ini juga diterangkan tentang konsep **Kapasitasi Sosial Integratif** (*Integrative Social Capacitation*), yaitu proses penguatan kapasitas masyarakat/komunitas secara kolektif, lintas sektor dan multi aktor. Konsepsi bertujuan membangun struktur sosial yang kuat, serta kolaborasi berkelanjutan untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada proses penguatan kapasitas masyarakat secara holistic. Kapasitasi sosial integratif tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis semata, tetapi juga mencakup penguatan struktur sosial serta pembangunan jaringan kolaboratif antar unsur komunitas, pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan perguruan tinggi (multi

### Gambar 5.20. Skema Kapasitas Sosial Integratif

Buku ini juga merumuskan desain konstruksi sosial berbasis pemberdayaan komunitas integratif yang dikembangkan melalui tahapan eksternalisasi, objektivasi, internalisasi, aktivasi, dan evaluasi. Tahapan tersebut terbukti mampu memperkuat kemandirian komunitas dalam mengelola desa wisata secara berkelanjutan. Model ini tidak hanya mendorong komunitas untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi lokal secara mandiri, tetapi juga membangun struktur sosial yang solid, memperluas jejaring eksternal, serta menginternalisasi nilai-nilai pemberdayaan sebagai bagian dari identitas kolektif masyarakat.

Melalui pendekatan siklus yang berkelanjutan ini, pengelolaan desa wisata berkembang menjadi lebih partisipatif dan berdaya. Pada akhirnya, proses tersebut mengarah pada terwujudnya desa wisata yang mandiri, adaptif, dan berkelanjutan, dengan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam menjaga kesinambungan sosial, budaya, dan ekonomi desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. (2011). *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2270>
- Bernsen, N. R., Crandall, M. S., Leahy, J. E., Abrams, J. B., & Colocousis, C. R. (2022). Do rural youth want to stay rural? Influences on residential aspirations of youth in forest-located communities. *Community Development*, 53(5), 566–584. <https://doi.org/10.1080/15575330.2021.1998170>
- Babaei, Hamidreza, et.al. 2012. *Bonding, Bridging and Linking Social Capital and Empowerment Among Squatter Settlements in Tehran, Iran*. *World Applied Sciences Journal* 1818-4952(17): 119-126.
- BPS Kabupaten Gowa. (2023). *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2023*. Gowa. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa.
- Creswell. John. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Chivers, C., Crabbe, C., Fullforth, J., Groome, J., Hoadley, J., Jensen, A., Beardmore, A., & Jones, M. (2022). Microgrants as a pathway for community development: A case study exploring impacts, implementation and context. *Community Development*, 54(3), 411–428. <https://doi.org/10.1080/15575330.2022.2091626>
- Creswell, J., 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih diantara lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar
- Chambers, Robert, *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*, (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Dalidjo, Nurdiansah. (2024). *Desa Wisata : Paradigma Pembangunan Alternatif untuk Pariwisata Berkelanjutan*. Yogyakarta : INSISTPress.
- Ife, Jim dan & Frank Tesoriero. (2008). *Community Development ; Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Parmawati, Rita. 2022. *Ekowisata : Determinan Pariwisata Berkelanjutan untuk mendorong Perekonomian Masyarakat*. Malang : UB Press.
- Halim, A. Iskandar. 2020. *SDGs Desa ; Percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Moleong, J. Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Soetomo. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat ; Mungkinkah Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- R. Adi, Isbandi. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ritzer, George. 2004. *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Ritzer, George. 2009. *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Pip, Jones, dkk. 2016. *Pengantar Teori-teori Sosial*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Wangke, Humphrey, 2020. *Membangun Kemitraan untuk Keberlanjutan Pembangunan*. Jakarta ; Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Rayuddin, 2018. *Sosiologi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Agrobisnis*. Bandung ; Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung ; Penerbit Alfabeta
- Dwijayanto, A. (2018). *Pemberdayaan Komunitas Muslim Perbukitan Melalui Program Sosial Bank Indonesia di Kaur Bengkulu*. *Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 53(1), 1-8.
- Eger, C., Miller, G., & Scarles, C. (2018). *Gender and capacity building: A multi-layered study of empowerment*. *World Development*, 106, 207-219. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.024>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. In *De La*

*Macca* (Vol. 1, Issue 1).

- Hidir, A., & Malik, R. (2016). *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Janice, A. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa BPMD dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1460–1471. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL\\_ELLA\(10-13-15-11-03-27\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/10/JURNAL_ELLA(10-13-15-11-03-27).pdf)
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2012). *Buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata Di Destinasi Pariwisata*. 56.
- Komaki, J. L. (2023). A positive reinforcement approach to police reform: Potential benefit for both Black and police communities. *Organizational Dynamics*, 52(2), 100976. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2023.100976>
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Wijayanti, T. (2019). PENDAMPINGAN PADA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN MATA PENCAHARIAN MELALUI PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUDA DESA DI DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS. *Jurnal PURUHITA*, 1(1), 47–53.
- Maclure, L. (2023). Augmentations to the asset-based community development model to target power systems. *Community Development*, 54(1), 4–17. <https://doi.org/10.1080/15575330.2021.2021964>
- Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi*, 5(2), 157–164. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457/354>
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013. <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>
- Prihantoro, S. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Empiris di Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo Kabupaten

- Purworejo). *Journal Of Non Formal Education and Community Empowerment*, 2(2), 15–21.
- Puspitasari, D. C. (2018). Wirausaha Muda Membangun Desa: Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. *Jurnal Studi Pemuda*, 4(2), 330. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36817>
- Rahmadanik, D. (2018). Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 909–913. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1293>
- Rahmat, H. K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Oleh Bintara Pembina Desa ( Babinsa ) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 91–107. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1237>
- Rahmiyati, N. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen*, 2(02). <https://doi.org/10.30996/jmm17.v2i02.506>
- Saldarriaga Isaza, A., & Salas, P. P. (2024). Community perception on the development of rural community-based tourism amid social tensions: A Colombian case. *Community Development*, 55(1), 123–137. <https://doi.org/10.1080/15575330.2023.2204441>
- Suhadi, A., A.R.Febrian, & S.Turatmiyah. (2014). Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang Batubara Di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14(1), 72–82.
- Supriadi, A. (2022). *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Pemda Karawang.
- Susanti, A. D. (2015). Pola Partisipasi Warga dalam Pengembangan Desa Wisata Umbul Sidomukti Kabupaten Semarang. *Modul*, 15(1), 47–56. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul/article/view/10735>
- Utami, V. Y. (2020). Dinamika Modal Sosial Dalam Pemberdayaan

- Masyarakat Pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial Dan Norma. *Reformasi*, 10(1), 34–44. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1604>
- van Corven, C. T. M., Bielderman, A., Wijnen, M., Leontjevas, R., Lucassen, P. L. B. J., Graff, M. J. L., & Gerritsen, D. L. (2021). Defining empowerment for older people living with dementia from multiple perspectives: A qualitative study. *International Journal of Nursing Studies*, 114, 103823. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103823>
- Puspitasari, D. C. (2018). Wirausaha Muda Membangun Desa: Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. *Jurnal Studi Pemuda*, 4(2), 330. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36817>
- Rahmadanik, D. (2018). Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 909–913. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1293>
- Rahmat, H. K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Oleh Bintara Pembina Desa ( Babinsa ) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 91–107. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/1237>
- Rahmiyati, N. (2016). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen*, 2(02). <https://doi.org/10.30996/jmm17.v2i02.506>
- Saldarriaga Isaza, A., & Salas, P. P. (2024). Community perception on the development of rural community-based tourism amid social tensions: A Colombian case. *Community Development*, 55(1), 123–137. <https://doi.org/10.1080/15575330.2023.2204441>
- Suhadi, A., A.R.Febrian, & S.Turatmiyah. (2014). Model Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tambang Batubara Di Kabupaten Lahat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14(1), 72–82.

- Supriadi, A. (2022). *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*. Pemda Karawang.
- Susanti, A. D. (2015). Pola Partisipasi Warga dalam Pengembangan Desa Wisata Umbul Sidomukti Kabupaten Semarang. *Modul*, 15(1), 47–56.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul/article/view/10735>
- Utami, V. Y. (2020). Dinamika Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Wisata Halal Setanggor: Kepercayaan, Jaringan Sosial Dan Norma. *Reformasi*, 10(1), 34–44.  
<https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1604>
- van Corven, C. T. M., Bielderman, A., Wijnen, M., Leontjevas, R., Lucassen, P. L. B. J., Graff, M. J. L., & Gerritsen, D. L. (2021). Defining empowerment for older people living with dementia from multiple perspectives: A qualitative study. *International Journal of Nursing Studies*, 114, 103823.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103823>  
<https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2021/09/01/penta-helix-dan-perubahan-sosial/> (diakses 21 November 2024)  
<https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-17/> (diakses 21 November 2024)
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Terj Rusiani. Jogjakarta : Qalam.
- Fathy, Rusydan. 2019. *Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 6 Nomor. 1
- Kolip, Usman & Setiadi. Elli M. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Kencana
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Moderen*. Universitas Of South Florida diindonesiakan oleh : Robert M. Z. Lawang: Gramedia Jakarta.
- PPS UNM.(2019). *Pedoman Penulisan Disertasi PPs UNM*
- Probiisiwi, Ratih & Afrinia. 2021. *Jogo Tonggo: Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19*. SOSIO KONSEPSIA : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 10 No 02 (2021): hal 177-192.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sarderson, Stephen. 2011. *Makro Sosiologi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Tadjuddin Noer Effendi. 2013. *Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini* . Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 2 No. 1, 2013
- Muryanti. 2014. *Revitalisasi Gotong Royong: Penguat Persaudaraan Masyarakat Muslim di Pedesaan*. Sosiologi Reflektif, Volume 9, N0. 1, Oktober 2014
- Esterberg, K. (2002). *Metode kualitatif dalam penelitian social*. McGraw Hill, Boston.
- Sutopo. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit: Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Yusuf, A.M. 2014. *Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Penerbit Prenadamedia Group. Jakarta.
- Muslim, Aziz. (2007). *Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Aplikasi ilmu-Ilmu Agama, 8 (2), 89-103.
- Mustafa. (2014). *Gerakan Membangun Bersama Masyarakat*. Ciputat: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Tonny, Fredian dan Bambang S. Utomo, (2003), *Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial*, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian IPB dan Program Pascasarjana IPB, Bogor
- Murdiyanto, Eko 2020. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal) -Edisi I - 2020*. 148 hlm ISBN: 978-623-7840-32-9
- John W. Creswell, 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixw Methods Approaches*. Third Edition. Sage Publication, California.
- Khotimah, K., Wilopo, W., & Hakim, L. (2017). *Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus pada Kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 41(1), 56-65.

- Rahma, A. A. (2020). Potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1-8. <https://doi.org/10.22146/jnp.52178>.
- Setiawan, I. B. D. (2015). Identifikasi Potensi Wisata Beserta 4A (Attraction, Amenity, Accessibility, Ancilliary) di Dusun Sumber Wangi, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Universitas Udayana.
- Sesbany. 2010. Penguatan Kelembagaan Petani Untuk Posisi Tawar Petani. STTP Medan. Medan.
- PPK & Puspari, LPPM UNS. (2004). Pengembangan Pariwisata Berbasis Penanggulangan Kemiskinan, Pusat Penelitian Kependudukan & Puspari. Surakarta: LPPM UNS.
- RB. Soemanto. (1999). *Sociology of Tourism, Readings on The Sociology of Tourism*. Bahan Bacaan Sosiologi Pariwisata. Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret.
- Sharpley, Richard. (1994). *Tourism, Tourist & Society*. Dalam Wahab.
- Soekadijo, R.G. (1995). *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata sebagai "Systemic Linkage"*. Jakarta: Gramedia.
- Soekadijo, R.G. (1997). *Wisata Minat Khusus*. Yogyakarta: PAU Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

## BIODATA PENULIS



**Dr. Nur Riswandy Marsuki, S.Sos.,M.Si** lahir di Gowa pada 20 November 1991. Merupakan seorang akademisi yang aktif dalam bidang pendidikan, penelitian, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Saat ini berprofesi sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar sejak

tahun 2017 hingga sekarang.

Riwayat pendidikan dimulai di **Pesantren IMMIM Putra Kota Makassar, Sulawesi Selatan** pada tahun 2003–2009. Setelah itu ia melanjutkan studi sarjana pada **Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar** pada tahun 2009–2014. Ia kemudian menempuh pendidikan magister pada **Departemen Sosiologi Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar** pada tahun 2014–2016. Untuk pengembangan keilmuan yang lebih lanjut, melanjutkan studi doktoral pada **Program Studi Ilmu Sosiologi Pascasarjana Universitas Negeri Makassar** pada tahun 2021–2025.

Selain aktif sebagai akademisi, Nur Riswandy Marsuki juga terlibat dalam berbagai organisasi sosial dan keummatan di tingkat daerah maupun nasional. Ia tercatat sebagai pengurus pada **Majelis Pengurus Pusat Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI)**. Di tingkat wilayah, sebagai **Sekretaris Pemuda ICMI Sulawesi Selatan** serta **Ketua Pembinaan Generasi Muda Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Sulawesi Selatan**. Penulis juga aktif dalam persyarikatan Muhammadiyah sebagai **Sekretaris Lembaga Pengembangan Cabang/Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCR-PM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gowa** dan **Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Parangloe**.

Dalam bidang akademik, aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Beberapa karya ilmiahnya telah dipublikasikan di jurnal internasional, di antaranya artikel berjudul *“Constructing Sustainable Community-Based Tourism: Institutional Challenges and Local Empowerment in Gowa Regency, Indonesia”* yang terbit di **Journal of Humanities and Social Sciences Studies**, *“Sustainable Tourism Village in the Perspective of Social Construction Empowerment Based on Tourism Awareness Group”* yang dipublikasikan di **South Eastern European Journal of Public Health**, serta artikel *“Communication in the Perspective of Strengthening Social Solidarity in Rural Communities in Wajo Regency”* yang dimuat dalam **The Journal of International Crisis and Risk Communication Research (JICRCR)**.

Selain publikasi jurnal, juga aktif menulis dan menerbitkan buku. Beberapa buku yang telah diterbitkannya antara lain **Tokoh Kewirausahaan Sosial (2022)**, **Pengantar Sosiologi (2023)**, serta **Menuturkan Harapan Kebangsaan: Sehimpun Pemikiran Pemuda ICMI untuk Indonesia (2024)**. Melalui aktivitas akademik, penelitian, dan keterlibatan dalam organisasi, penulis terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Sosiologi, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. **Email korespondensi:** [riswandymarsuki@unismuh.ac.id](mailto:riswandymarsuki@unismuh.ac.id)